



**EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH (BOS) DI SD NEGERI GIRIREJO 02
KEC.NGABLAH, KAB. MAGELANG**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Magister Pendidikan**

Ditulis oleh:

Rinda Herdiyani

0102515030

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN

PASCASARJANA

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul “ Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Girirejo 02 Kec.Ngablak Kab.Magelang” karya :

Nama : Rinda Herdiyani

NIM : 0102515030

Program Studi : Manajemen Pendidikan

Telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Ujian Tesis.

Semarang, September 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Tri Joko Raharjo, M.Pd.

Prof. Dr. Etty Soesilowati, M.Si.

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul "Efektifitas Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Girirejo 02 Kec.Ngablak, Kab.Magelang" karya,

nama : Rinda Herdiyani

NIM : 0102515030

Program Studi : Manajemen Pendidikan

telah dipertahankan dalam sidang panitia ujian tesis Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang pada hari Rabu, tanggal 24 September 2019

Semarang, September 2019

Panitia Ujian



Ketua
Prof. Dr. Ika Zulacha, M.Hum
NIP 197601091994032001

Sekretaris,

Dr. Arief Yulianto, SE, MM
NIP 197507262000121001

Penguji I,

Dr. Nina Oktarina, S.Pd, M.Pd
NIP 197810072003122002

Penguji II,

Prof. Dr. Ety Soesilowati, M.Si.
NIP 196304189012001

Penguji III,

Prof. Dr. Tri Joko Raharjo, M.Pd
NIP 195903011985111001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya

nama : Rinda Herdiyani

nim : 0102515030

program studi : Manajemen Pendidikan

menyatakan bahwa yang tertulis dalam Tesis yang berjudul ” Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Girirejo 02, Kec.Ngablak, Kab.Magelang ” ini benar-benar karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam Tesis ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Atas pernyataan ini saya **secara pribadi** siap menanggung resiko/sanksi hukum yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini.

Semarang, September 2019

Yang membuat pernyataan,

Rinda Herdiyani

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto

“ Kamu tidak akan bisa kembali ke masa lalu dan memperbaiki pangkalnya, tapi kamu bisa mulai berubah dari sekarang dan merubah ujungnya”.

”Jangan pernah menyerah selagi kamu bidoa didampingi dengan usaha niscaya Allah mengabulkan doa kita”. (C.S Lewis)

Tesis ini dipersembahkan kepada :

Almamater tercinta Universitas Negeri Semarang
Program Studi Manajemen Pendidikan
SD Negeri Girirejo 02

ABSTRAK

Herdiyani.Rinda. 2019. ” Efektifitas Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri Girirejo 02, Kec.Ngablak, Kab.Magelang. Tesis. Program Studi Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.

Pembimbing I Prof. Dr. Tri Joko Raharjo, M.Pd., Pembimbing II Prof. Dr. ETTY Soesilowati, M.Si

Kata Kunci : Manajemen, Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi

Masalah yang dihadapi seluruh sekolah dasar yaitu dana BOS datang tidak tepat waktu, dan komite kurang memahami pengelolaan dana BOS.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS di SDN Girirejo 02.

Penelitian ini dilaksanakan pada SD Negeri Girirejo 02 Kec.Ngablak, Kab. Magelang. Data dikumpulkan dengan metode wawancara, kuesioner dan dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis dengan analisis deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan RKAS tepat waktu diawal tahun anggaran, berdasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, serta melibatkan komite dan guru. Aspek pelaksanaan belum seluruhnya berhasil dikarenakan penyaluran dana BOS masih terlambat. administrasi pembukuan sudah sesuai dengan Permendiknas No. 48 Tahun 2017. Aspek pengawasan masih belum berhasil karena belum ada pengawasan dari pihak komite sekolah dan dinas terkait secara berkala. Aktifitas evaluasi oleh pihak komite sudah dilakukan meskipun belum maksimal. Pelaporan pengelolaan dana BOS di SDN Girirejo 02 dapat dikatakan sudah berhasil dikarenakan sudah membuat laporan sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS sesuai dengan Permendiknas No.48 Tahun 2017. Tingkat efektivitas pengelolaan dana BOS pada SD Negeri Girirejo 02 mencapai 63%, berada dalam kriteria efektif.

Upaya yang dilakukan seluruh sekolah dasar yaitu melakukan pinjaman dana serta berbelanja secara kredit, dan melakukan penguatan pada komite terkait dana BOS.

ABSTRACT

Herdiyani.Rinda. 2019. " The Effectiveness Distribution of Funds Operational Assistance to Elementary School Girirejo 02, Ngablak Subdistrict in Magelang Magelang . Thesis. Departemen of Educational Management, Graduate Program of Semarang State University.

Supervisor I Prof. Dr. Tri Joko Raharjo, M.Pd., Supervisor II Prof. Dr. Etty Soesilowati, M.Si

Keywords: Managemen, Planning, Implementation, Evaluation

Problems faced by elementary schools 02 Girirejo that BOS does not come on time, and the lack of understanding of the management committee of BOS.

The research objective was to describe about planning, implementation and supervision, evaluation and reporting and responsibility of funding management of school operational board at public elementary school 02 Girirejo.

Data were collected by interview, questionnaire and documentation, were further analyzed by quantitative descriptive analysis.

The results showed that the arrangement of the planning of school funding and activity was on time in the beginning of the estimation year, based on priority scale of school need, and involve school committee and teachers. The implementation had not been success overall because the distribution of BOS funding was still late. Bookkeeping administration had been relevant to the regulation of national education minister No. 48 year 2017. The supervision aspect had not succeeded yet because there was not supervision from school committee and local department of education periodically. The evaluation activity by committee had been implemented though it was not maximum. The report of BOS funding management at public elementary school 02 Girirejo can be stated as success because it has made the report based on technical guide of BOS funding management in line with the regulation of National Education Minister No. 48 year 2017. The level of effectiveness of the management of BOS in elementary schools 02 Girirejo reached 63%, be effective criteria.

Efforts made throughout elementary school 02 Girirejo that is doing the loan funds, and shopping on credit, and strengthening the committees on BOS.

PRAKATA

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat –Nya. Berkat karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “ Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Girirejo 02 Kec.Ngablak Kab.Magelang”. Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan meraih gelar Magister Pendidikan pada program studi Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.

Penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan pertama kali kepada para pembimbing : Prof. Dr. Tri Joko Raharjo, M.Pd. (Pembimbing I) dan Prof. Dr. Etty Soesilowati, M.Si. (Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, wawasan dan ilmu serta motivasi kepada peneliti sejak awal penelitian hingga selesainya tesis ini.

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan juga kepada semua pihak yang membantu selama proses penyelesaian studi, di antaranya :

1. Direksi Pascasarjana Unnes, yang telah memberikan kesempatan serta arahan selama pendidikan, penelitian dan penulisan tesis ini.

2. Prof. Dr. Tri Joko Raharjo, M.Pd., Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan serta arahan selama pendidikan, penelitian dan penulisan tesis ini.
3. Dr. Arief Yulianto, S.E.,MM., Sekertaris Program Studi Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan serta arahan selama pendidikan, penelitian dan penulisan tesis ini.
4. Bapak dan ibu dosen Pascasarjana Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan serta arahan selama pendidikan, penelitian dan penulisan tesis ini.
5. Bapak Drs. Kun selaku Kepala Sekolah SD Negeri Girirejo 02, Kec. Ngablak, Kab. Magelang yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian.
6. Ibu Ristiyaningsih S .Pd selaku Bendahara BOS di Sekolah SD Negeri Girirejo 02, Kec. Ngablak, Kab. Magelang yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian.
7. Guru-guru dan Komite Sekolah SD Negeri Girirejo 02, Kec. Ngablak, Kab. Magelang yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian.

8. Kedua orang tuaku H. Sukarlan S.Pd Sd, dan Hj. S. Priyani yang telah memberikan doa yang tulus serta motivasi kepada peneliti hingga tesis ini dapat terselesaikan.
9. Suami dan anak tercinta Subandriyo dan Aqila Adelia Saqueena yang telah memberikan doa dan semangat bagi penulis hingga tesis ini dapat terselesaikan.
10. Semua sahabat seperjuangan program studi Manajemen Pendidikan angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dan sumber inspirasi sehingga dalam proses penelitian tesis ini dapat terselesaikan.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN UJIAN TESIS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Cakupan Masalah	12
1.4 Rumusan Masalah	13
1.5 Tujuan penelitian	13
1.6 Manfaat Penelitian	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS dan KERANGKA BERPIKIR	
2.1 Kajian Pustaka	18
2.2 Kerangka Teoritis	46
2.3 Kerangka Berpikir	86
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	89
3.2 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	89
3.3 Teknik Analisis Data	93
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	
4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian	96
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian	99

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian	107
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan	115
5.2 Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN – LAMPIRAN	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	88
------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penyaluran Dana BOS SD Se Kabupaten Magelang	7
Tabel 1.2 Penyaluran Dana BOS SDN Girirejo 02	9
Tabel 1.3 Penerimaan BOS dalam 3 tahun terakhir di SDN Girirejo 0210...	10

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (*instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (*di sekolah*). Tujuan pendidikan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif dapat dicapai dengan adanya biaya pendidikan. Dalam dunia pendidikan hampir tak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan tanpa biaya, proses pendidikan (*di sekolah*) tidak akan berjalan dengan baik.

Dalam teori dan praktik pembiayaan pendidikan, baik tataran makro maupun mikro, dikenal beberapa kategori biaya pendidikan (Supriyadi,2010:4). Pertama biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Kedua biaya pribadi (*private cost*) biaya pribadi adalah pengeluaran yang berasal dari dana pribadi (keluarga) untuk membiayai pendidikan atau dikenal juga pengeluaran rumah tangga (*household expenditure*). Selain dua hal diatas dikenal juga anggaran belanja pendidikan (*educational budget*) yang terdiri atas dua komponen, yaitu sumber dana (pendapatan), pemasukan atau penerimaan, yang kedua pengeluaran atau belanja. Dalam implementasinya belanja di sekolah dasar dikelompokkan menjadi tiga komponen antara lain belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Sumber dana di sekolah hendaknya dengan baik mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporannya.

Pembiayaan pendidikan tertera dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 pasal (1) tentang pengelolaan keuangan negara dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional lebih lanjut telah mengatur beberapa pasal yang menjelaskan pendanaan pendidikan yaitu pada Pasal 11 Ayat 2 dan Pasal 12, Ayat (1).

Reformasi pendidikan mengacu pada 8 standar, yaitu (1) standar kompetensi lulusan, (2) standar isi, (3) standar proses (pembelajaran), (4) standar penilaian, (5) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (6) standar sarana-prasarana, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar pengelolaan.

Bagi sekolah negeri di Indonesia sumber dana sekolah terbagi menjadi dua, yaitu : (a) dari pemerintah yang terdiri atas dana rutin, yaitu gaji serta biaya Operasional sekolah dan perawatan fasilitas; dan (b) dana dari masyarakat yang berasal dari orang tua siswa maupun sumbangan dari masyarakat luas/dunia usaha. Penyelenggaraan pendidikan dalam operasionalnya tidak dapat dipisahkan dari berbagai aspek yang menunjang keberhasilan tujuan pendidikan, yakni pengelolaan sumber - sumber daya yang ada baik di dalam maupun di luar lembaga. Salah satu aspek tersebut, berkenaan dengan pembiayaan yang harus dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah suatu kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi kebijakan dalam perluasan dan pemerataan akses pendidikan, khususnya dalam mendukung program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) sembilan tahun. BOS merupakan

implementasi dari Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya serta wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dari pemerintah daerah dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat dengan menjamin bahwa peserta didik tidak terbebani oleh biaya pendidikan.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan kepada sekolah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Dalam buku panduan BOS (2010:28-29) disebutkan bahwa penggunaan dana BOS dialokasikan pada beberapa jenis kegiatan yaitu: penerimaan siswa baru, pembelian buku referensi dan buku teks pembelajaran, biaya pembelajaran tambahan dan ekstrakurikuler, biaya ulangan dan ujian, pembelian barang habis pakai, langganan daya dan jasa serta perawatan sekolah, honor guru dan kegiatan pengembangan profesi, transport siswa miskin, biaya pengelolaan BOS, pembelian komputer desktop, media pembelajaran dan mebeler (jika masih ada sisa dana).

Pengelolaan pembiayaan secara umum sebenarnya telah dilakukan dengan baik oleh semua sekolah. Hanya kadar substansi pelaksanaannya yang

beragam antara sekolah yang satu dengan yang lainnya. Adanya keragaman ini bergantung kepada besar kecilnya tiap sekolah, letak sekolah dan julukan sekolah. Pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya masih tergolong rendah, manajemen pembiayaan pendidikan pun masih sederhana. Sedangkan, pada sekolah-sekolah biasa yang daya dukung masyarakatnya besar, tentu saja manajemen pembiayaan cenderung lebih rumit.

BOS dikelola oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Penggunaan BOS hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun. Pengelolaan BOS mengikut sertakan dewan guru dan Komite Sekolah. Dalam hal pengelolaan BOS menggunakan MBS, maka SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK harus 1. mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan, 2. melakukan evaluasi setiap tahun; 3. menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dengan ketentuan: a. RKAS memuat BOS; b. RKJM disusun setiap 4 (empat) tahun; c. RKJM, RKT, dan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah; d. RKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan

Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya (Jukni Bos 2017).

Tujuan BOS pada 1. SD/SDLB/SMP/SMPLB untuk membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah, meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat. 2. SMA/SMALB/SMK untuk membantu biaya operasional sekolah nonpersonalia, meningkatkan angka partisipasi kasar, mengurangi angka putus sekolah, mewujudkan keberpihakan Pemerintah Pusat (affirmative action) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu dengan membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di SMA/SMALB/SMK sekolah, memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu, dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah (Juknis Bos 2017).

Salah satu sekolah dasar negeri yang ada di Kecamatan Ngablak adalah Sekolah Dasar Negeri Girirejo 02, sekolah ini terletak di bawah lereng gunung Andong yang beralamat di Desa Srigading, Kecamatan Ngablak, Kabupaten

Magelang. Perlu untuk diketahui bahwa dikecamatan Ngablak sampai saat ini terdapat 23 Sekolah Dasar Negeri dan 7 Madrasah Ibtidaiyah Swasta.

SD Negeri Girirejo 02, merupakan salah satu sekolah negeri yang maju di Kecamatan Ngablak, selain maju kelebihan yang dimiliki SD Negeri Girirejo 02 yaitu, tenaga pendidik di sekolah tersebut terbilang kompeten karena rata-rata tenaga pendidik telah memiliki gelar SI Pendidikan, memiliki fasilitas yang memadai untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar di sekolah, pemberian *reward* pada siswa yang berprestasi dalam bidang akademik maupun nonakademik dalam berbagai kategori di akhir tahun pelajaran, pemberian *reward* pada guru dan karyawan yang berprestasi, dan lain sebagainya. Bahkan banyak masyarakat yang ingin mendaftarkan putra putrinya di sekolah tersebut, karena sekolah tersebut sangat disukai masyarakat atau bisa dikatakan sekolah favorit. Dianggap sekolah favorit karena banyak menghaikan lulusan yang bagus dan banyak mendapatkan juara dalam perlombaan akademik maupun nonakademik. Alasan orang tua mendaftarkan anak mereka selain dengan prestasi akademik, letak sekolah tersebut juga sangat strategis dan tidak terletak di pinggir jalan raya.

Adapun penyaluran dana BOS pada sekolah tingkat SD/MI dalam tiga tahun terakhir (2015-2017) yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang seperti tertuang dalam tabel 1.1 di bawa ini :

Tabel 1.1 Penyaluran Dana BOS SD Se Kabupaten Magelang

No	Jenis Data	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Jumlah Sekolah	602	603	605
2.	Jumlah Siswa	90.454	89.244	88.922
3.	Jumlah Dana BOS	Rp18.090.800.000	Rp 17.848.800.000	Rp 14.227.520.000

Sumber : Dokumen Dipendik

Dengan adanya program dana BOS, sekolah dituntut kemampuannya untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan biaya-biaya pendidikan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Pengawasan pengelolaan dana BOS dilaksanakan oleh Tim Bos Pusat, Tim Bos Provinsi, Tim Bos Kabupaten hingga Tim Bos Sekolah. Pengelolaan pembiayaan pendidikan akan berpengaruh secara langsung terhadap mutu pendidikan sekolah, terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar. Pengelolaan BOS tidak terlepas dari peranan kepala sekolah dalam pengertian cara kepala sekolah mengatur alokasi pembiayaan untuk operasional sekolah. Mulyasa (2006:194) menyatakan bahwa kepala sekolah profesional dituntut memiliki kemampuan manajemen keuangan sekolah, baik melakukan perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi dan pertanggungjawabannya. Aspek mendasar dari manajemen adalah perencanaan, dalam hal pembiayaan yang disebut penganggaran. Perencanaan merupakan proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan kepala sekolah

merencanakan keuangan untuk rencana kegiatan beserta sumber daya pendukung lainnya yang ada di sekolah merupakan sesuatu yang sangat penting.

Kebijakan pemerintah berupa Bantuan Operasional Sekolah diperuntukkan bagi siswa SD/MI dan SMP/MTs, dalam hal ini peneliti akan membatasi diri tidak meneliti Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan pemerintah kepada SD/MI dan SMP/MTs tetapi hanya di SD saja. Hal ini bermaksud agar pembahasan tidak terlalu lebar dan bias. Sebelum pemerintah memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagian besar Sekolah Dasar (SD) cukup memperhatikan, karena sebagian besar dana diperoleh melalui sumbangan orang tua dalam bentuk SPP (sumbangan penyelenggaraan pendidikan). Besaran SPP tiap siswa relatif kecil dan jauh dari cukup karena didasarkan atas kemampuan orang tua. Sekolah sulit berkembang dengan kondisi pendanaan yang masih kurang.

Setelah program BOS digulirkan sekolah agak leluasa dalam membiayai kegiatan sehingga aktifitas sekolah bertambah. Sampai saat ini BOS menjadi primadona bagi sekolah sebagai sumber pembiayaan terbesar. Walaupun demikian dengan meningkatnya kebutuhan dan tuntutan global ternyata dana bantuan pemerintah tersebut masih kurang.

Dalam manajemen pembiayaan, satu diantara instrumen yang penting adalah penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Penyusunan RAPBS mendasari pelaksanaan (akuntansi) dan evaluasi (auditing) program secara transparan, akuntabel dan demokratis. Penyusunan anggaran dan

pengembangan RAPBS mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya: 1) laju pertumbuhan peserta didik, 2) inflasi, 3) pengembangan program dan perbaikan, dan 4) proses pengajaran dan pembelajaran.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mulai tahun 2011 mengalami perubahan dari dana APBN menjadi dana perimbangan yang dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah dalam bentuk Dana Penyesuaian untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN. Kebijakan tersebut mengandung konsekuensi penyesuaian dengan aturan yang berlaku karena dana BOS tidak langsung diterima oleh sekolah sebagai penerima bantuan, namun melalui kas daerah (APBD) terlebih dahulu sehingga harus menyesuaikan dengan penatausahaan daerah. Alur pencairan dana BOS semakin panjang, sekolah diharuskan menyusun RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) sebagai syarat pencairan dana. Sehingga terjadi keterlambatan pencairan dana yang berakibat terganggunya pendanaan sekolah yang otomatis berpengaruh terhadap keterlaksanaan program sekolah.

Adapun penyaluran dana BOS pada sekolah tingkat SD/MI dalam tiga tahun terakhir (2015-2017) yang diperoleh dari SDN Girirejo 02 seperti tertuang dalam tabel 1.2 di bawa ini :

Tabel 1.2 Penyaluran dana BOS di SDN Girirejo 02 tahun 2015-2017

No	Jenis Data	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Jumlah Siswa	125	129	131
2	Jumlah Dana BOS	Rp 100.000.000	Rp 103.200.000	Rp 104.800.000

Sumber : Dokumen Dana BOS SDN Girirejo 02

Jumlah penyaluran dana BOS di SDN Girirejo 02 dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dikarenakan jumlah siswa yang semakin bertambah. Pembiayaan pendidikan di SD Negeri Girirejo 02 tidak hanya menyangkut bagaimana pendidikan itu dibiayai tetapi bagaimana biaya yang tersedia tersebut dialokasikan. Keterbatasan biaya pendidikan dikhawatirkan akan menurunkan mutu pendidikan. Kendala dalam pengelolaan biaya pendidikan di SD Negeri Girirejo 02 adalah sering terjadi keterlambatan dalam pertransferan dana bos dari pusat sehingga menyebabkan pemaparan pelaporan dana bos tidak efektif dan efisien. Kendala lain yang dialami SD Negeri Girirejo 02 adalah pemesanan buku pelajaran yang terlambat pengirimannya sehingga itu juga memperlambat pelaporan penggunaan dana BOS. (Wawancara dengan Kepala Sekolah, Kamis 7 Februari 2019)

Adapun penerimaan dana BOS pada sekolah tingkat SD/MI dalam tiga tahun terakhir (2015-2017) yang diperoleh dari SDN Girirejo 02 seperti tertuang dalam tabel 1.3 di bawa ini :

Tabel 1.3 Penerimaan dana BOS dalam 3 tahun terakhir di SDN Girirejo 02

No	Tahun	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	
		Jatuh tempo	waktu terima	jatuh tempo	waktu terima	jatuh tempo	waktu terima	jatuh tempo	waktu terima
1	2015	awal	03/02/2015	awal	10/04/2015	awal	09/07/2015	awal	12/10/2015
2	2016	bulan	29/01/2016	bulan	12/04/2016	bulan	28/07/2016	bulan	17/10/2016
3	2017	Januari	02/02/2017	April	19/05/2017	Juli	06/09/2017	Oktober	

Sumber : Dokumen penerimaan BOS SDN Girirejo 02

Seringnya terjadi keterlambatan petransferan dana BOS di triwulan awal tahun, menyebabkan pemberian honorarium terhutang, meminimalis kebutuhan operasional sekolah, dan memperlambat kegiatan kesiswaan. Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan

ketentuan per tahunnya sebesar: Rp 800.000 / siswa / tahun untuk siswa SD. Dana BOS seharusnya diterima setiap triwulanan (tiga bulanan), yaitu: 1) Triwulan Pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Maret) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada awal bulan Januari , 2) Triwulan Kedua (bulan April sampai dengan bulan Juni) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan April , 3) Triwulan Ketiga (bulan Juli sampai dengan bulan September) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli .

Manajemen dana BOS di sekolah diharapkan dapat dicairkan dengan tepat waktu sehingga tidak menghambat pelaksanaan program, dapat dikelola secara profesional transparan dan akuntabel, memberikan layanan yang memadai kepada siswa dan penggunaan model pengelolaan yang tepat serta adanya monitoring dan evaluasi yang efektif. Namun kenyataan yang ada dilapangan ternyata pencairan yang masih terlambat, anggaran disusun atas dasar ketersediaan dana, kurang profesional, transparan dan akuntabel, serta adanya monitoring dan evaluasi yang kurang efektif. Dengan demikian masih adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Dengan kondisi antara tuntutan dan harapan , antara kenyataan dan keinginan , bahkan dipojokan sekolah sebagai lahan korupsi , peneliti merasa tertarik untuk mengetahui dan menganalisis Efektifitas penyaluran dana BOS di SD Negeri Girirejo 02, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang dengan tujuan untuk mengetahui kepatuhan dan strategi sekolah dalam mengelola dana

BOS. Di samping itu untuk mengetahui transparansi pengelolaan keuangan BOS beserta nilai manfaatnya bagi upaya peningkatan mutu pengelolaan keuangan pendidikan.

Hal yang menarik untuk diteliti adalah tim manajemen sekolah dalam mengelola dana BOS menggunakan metode alternatif. Suatu model pengelolaan dengan melibatkan berbagai elemen sekolah mulai dari kepala sekolah, bendahara, guru, karyawan dan komite sekolah. Model alternatif ini merupakan pengembangan model standar dalam pengelolaan BOS sebagaimana dalam Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS tahun 2010.

Permasalahannya adalah bagaimana sekolah melakukan strategi dan model alternatif yang diterapkan dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga mampu menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS dapat dilaksanakan secara profesional, transparan, demokrasi dan akuntabel.

Upaya pengelolaan pembiayaan pendidikan dana Bos di SD Negeri Girirejo 02 dilakukan dengan berprinsip pada transparansi, akuntabilitas, efisien dan efektif. Berdasarkan pengamatan di lapangan diketahui bahwa kepala sekolah dan guru menyadari sepenuhnya bahwa biaya pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dan menentukan kegiatan pembelajaran. Hampir semua kegiatan membutuhkan biaya sehingga dapat dikatakan tanpa biaya, proses pendidikan di SD Negeri Girirejo 02 tidak berdaya sama sekali. Biaya yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pendidikan di SD Negeri Girirejo 02 memiliki cakupan yang luas yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan

dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang, barang ataupun tenaga (yang dapat dihargai dengan uang).

Pentingnya pembiayaan di SD Negeri Girirejo 02 menuntut Kepala Sekolah dan Guru untuk melakukan pengelolaan sumber dana pendidikan secara efektif dan efisien. Pengelola keuangan terutama dalam mengalokasikan penggunaan uang sudah sepantasnya dilakukan oleh sekolah. Hal ini juga disadari oleh kenyataan bahwa sekolahlah yang paling memahami kebutuhannya sehingga desentralisasi pengalokasian uang sudah dilimpahkan ke sekolah. Sekolah harus diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pendapatan sehingga sumber keuangan tidak semata-mata tergantung pada pemerintah.

Realitanya masalah yang dihadapi di SD Negeri Girirejo 02 mengenai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan Dana BOS. Perencanaan pengelolaan dana BOS di SD Negeri Girirejo 02 yaitu tidak melibatkan Komite atau instansi yang terlibat dalam perencanaan BOS. Perencanaan dalam juknis terdapat beberapa unsur penyusunan RKAS yaitu Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Guru dan Tenaga pendidik sedangkan di SDN Girirejo 02 dalam menyusun RKAS hanya melibatkan Kepala Sekolah dan Guru. (Wawancara dengan Kepala Sekolah, Kamis 7 Februari 2019)

Masalah yang lain adalah bahwa pelaksanaan BOS sudah sesuai Juknis tetapi Kepala sekolah kurang menguasai Manajemen keuangan Sekolah dikarenakan Kepala sekolah kurang menguasai teknologi dan usianya sudah tua

sehingga beban di berikan kepada bendahara, akan tetapi bendahara hanya memeriksa saja dan membebankan pada guru lain. Masalah yang lain yaitu tentang pengawasan yang kurang optimal dari atasan atau Kepala UPTD bahkan evaluasi yang kurang optimal dikarenakan evaluasi hanya memilih beberapa sekolah.

Mutu pendidikan masih dapat ditingkatkan meskipun anggaran kecil melalui perbaikan substansi pendidikan dan manajemen yang efisien. Dalam hal pengelolaan keuangan SD Negeri Girirejo 02, biaya yang diperoleh selain berasal dari pemerintah , sekolah tidak menggalang dana dari orang tua siswa ataupun masyarakat. Perencanaannya dituangkan dalam RAPBS dan hal ini merupakan target yang harus dicapai.

Kuangan sekolah merupakan bagian yang amat penting karena setiap kegiatan di sekolah memerlukan biaya. Harsono (2008: 9), mengungkapkan bahwa biaya pendidikan adalah semua pengeluaran yang memiliki kaitan langsung dengan penyelenggaraan dengan penyelenggaraan pendidikan. Setiap pengeluaran yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan dapat disebut dengan pemborosan atau pengeluaran yang seharusnya dapat dihindari atau dicegah.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas muncul beberapa identifikasi masalah antara lain :

1. Pengelolaan dana BOS SDN Girirejo 02 terlambat disebabkan keterlambatan petransferan dana.
2. Perencanaan , pelaksanaan dan evaluasi kurang efektif dan efisien.
3. Minimalnya penguasaan ITI pada guru SDN Girirejo 02 yang masa kerjanya lebih dari 20 tahun

1.3 Cakupan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, dapat terlihat betapa banyaknya permasalahan yang timbul. Banyaknya permasalahan yang terdapat pada identifikasi masalah, maka sulit bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang mencakup semua masalah yang ditemukan. Agar permasalahan yang diteliti dapat terfokus dan tidak menjangkau terlalu luas, maka dalam penelitian ini hanya dibatasi pada Efektivitas penyaluran dana BOS yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyaluran dana BOS di SD Negeri Girirejo 02, Kec. Ngablak , Kab. Magelang “.

1.4 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka timbullah beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas perencanaan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Girirejo 02, Kec. Ngablak , Kab. Magelang ?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Girirejo 02, Kec.Ngablak, Kab. Magelang ?
3. Bagaimana efektivitas evaluasi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Girirejo 02, Kec.Ngablak, Kab. Magelang ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian di atas tentang Efektifitas penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Girirejo 02, Kec. Ngablak , Kab. Magelang, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis :

1. Efektivitas Perencanaan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Girirejo 02, Kec. Ngablak , Kab. Magelang.
2. Efektivitas Pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Girirejo 02, Kec. Ngablak, Kab. Magelang.
3. Efektivitas Evaluasi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Girirejo 02, Kec. Ngablak, Kab. Magelang.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu manajemen pendidikan yang berkaitan dengan konsep atau teori tentang manajemen keuangan BOS. Bagi para peneliti dan pengamat pendidikan dapat dijadikan bahan acuan khususnya dalam masalah efektifitas penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) khususnya dan Manajemen pembiayaan sekolah pada umumnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Sekolah, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sekolah, dapat digunakan sebagai sumber pemikiran dalam rangka penyempurnaan konsep maupun implementasi manajemen keuangan sebagai upaya strategis dalam pengembangan kualitas sekolah. Manfaat bagi Dinas Pendidikan, dapat diajukan sebagai acuan dalam manajemen keuangan.
- b. Bagi Peneliti, diharapkan untuk lebih mengetahui secara mendalam tentang Efektifitas Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta penerapan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.
- c. Bagi Pemerintah, memberikan masukan untuk peningkatan kualitas pengawasandan buku panduan pelaksanaan Efektifitas penyaluran Dana BOS.
- d. Bagi pihak sekolah penerima Dana BOS, diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dan lebih transparan dalam Efektifitas Penyaluran Dana BOS.
- e. Bagi Komite Sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai peran Komite Sekolah dalam Efektifitas Penyaluran Dana BOS.
- f. Bagi Orang Tua Siswa dan Masyarakat, memberikan pengetahuan agar masyarakat mampu menganalisis apakah Efektifitas Penyaluran Dana BOS sudah wajar atau tidak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA , KERANGKA TEORETIS dan KERANGKA BERPIKIR

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini yaitu berdasarkan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh :

1. Penelitian Ali Mahrus Alkafi (2012) dalam penelitiannya yang berjudul

“ *Pengaruh SIM Menggunakan Aplikasi Software SDS++ Terhadap Efektifitas Pengelolaan BOS SMP di Kota Magelang*” menyatakan bahwa Perencanaan dana BOS meliputi verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada, khusus bagi sekolah SBI dan RSBI serta sekolah swasta, Tim BOS Sekolah mengidentifikasi siswa miskin dan membebaskan dari segala jenis iuran, mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS dan mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan efisiensi dalam penyusunan perencanaan penggunaan dana BOS sebelum dan sesudah menggunakan software SDS++. Hasil ini memberikan makna bahwa dengan software SDS++ maka percepatan dan kecepatan dalam penyusunan perencanaan akan dapat terwujud.

Sistem pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS juga harus memenuhi unsur-unsur transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam sistem pembukuan penggunaan dana BOS, sebelum dan sesudah menggunakan *software* SDS++. Hasil ini memberikan makna bahwa dengan *software* SDS++ maka keakuratan dalam pembukuan penggunaan dana BOS dapat terwujud.

2. Penelitian Hendy Prastyo (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “*Survei Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Olahraga pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2013*” menyatakan bahwa hambatan Kegiatan Ekstrakurikuler Olahraga Pada Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar termasuk dalam kategori tidak ada hambatan dilihat dari faktor siswa. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh beberapa sekolah yang menyatakan bahwa belum terpenuhinya sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penghambat kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Sumarjo selaku kepala sekolah SDN 02 Ngargoyoso yang menyatakan kurangnya sarana prasarana di sekolah. ”sarana dan prasarana belum memenuhi, dari pihak sekolah ada usaha yaitu melalui dana BOS” kata beliau. Hasil observasi di lapangan diperoleh gambaran bahwa hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan adalah sarana dan prasarana serba kekurangan dan juga pendanaan hanya bersumber pada pengalokasian dana BOS.

3. Penelitian Endah Dwi Hayati (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “ *Manajemen Pembiayaan Berbasis Sekolah di RSBI SMPN 3 Mranggen Demak*” menyatakan bahwa manajemen pembiayaan di RSBI SMPN 3 Mranggen Demak yang meliputi kegiatan perencanaan (budgeting), pelaksanaan/pencatatan (accounting) dan pertanggungjawaban/ pengawasan (auditing). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. Analisa data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) perencanaan pembiayaan / budgeting di SMPN 3 Mranggen dilaksanakan dengan menyusun RAPBS. Dana penyelenggaraan pendidikan di SMP tersebut meliputi block grant dan BOS dari serta dana komite dari orang tua siswa. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pendidikan yang diarahkan untuk penjaminan mutu RSBI yang dikelompokkan berdasarkan 8(delapan) standar nasional pendidikan. (2) Pelaksanaan/ pencatatan (accounting) pembiayaan di SMPN 3 Mranggen terdiri dari dua kegiatan, yaitu pelaksanaan anggaran dan pencatatan anggaran. Pelaksanaan anggaran merupakan tanggungjawab masing-masing koordinator standar pendidikan, sedangkan pencatatan anggaran merupakan tanggungjawab bendahara yang dalam melaksanakan tugasnya menggunakan sistem akuntansi sederhana. (3) Pertanggungjawaban/pengawasan pembiayaan dilaksanakan dengan menyusun laporan pertanggungjawaban, sedangkan pengawasan dilakukan

secara internal dan eksternal dari inspektorat pendidikan, BPKP dan BPK, juga pengawasan melekat oleh kepala sekolah.

4. Penelitian Kartika Ratnaningtyas dan Rediana Setiyani (2017) dalam penelitian yang berjudul “ *Efektivitas Komite Sekolah sebagai Badan Pengawas Manajemen Keuangan Sekolah pada SMA Negeri Se-Kota Semarang*” menyatakan bahwa Komite sekolah menjalankan peran sebagai badan pengawas manajemen keuangan dengan baik. Dengan adanya komite sekolah yang berperan aktif menjadi pengawas manajemen keuangan sekolah fungsi dari komite sekolah sebagai badan pertimbangan dan pengontrol berjalan dengan baik, meskipun segala bentuk pertanggung jawaban keuangan dilaporkan secara langsung kepada pemerintah, komite sekolah tetap mengetahui jalannya pengelolaan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban pihak komite sekolah kepada orang tua siswa. 2) Dari analisis data, dapat diketahui bahwa efektivitas komite sekolah sebagai badan pengawas pengelolaan manajemen keuangan sekolah pada SMA Negeri Se-Kota Semarang adalah efektif. Komite sekolah masih terlibat dalam program sekolah walaupun sedikit berkurang fungsinya pada bagian keuangan karena dana sekolah dibiayai oleh dana BOS, namun tidak menghilangkan fungsi komite sekolah yang lainnya. Komite sekolah tetap megawasi jalannya pengelolaan keuangan sekolah.
5. Penelitian Udin Winarno, dkk (2016) dengan judul “*Analisis Media yang Digunakan Guru Sejarah dalam Pembelajaran Sejarah pada Dua Sekolah*”

Menengah Atas di Kota Semarang Tahun Pelajaran 2015/2016 (Studi Kasus pada SMA Kolose Loyola Semarang dan SMA Negeri 5 Semarang)” menyatakan bahwa Upaya penentu kebutuhan media pembelajaran sejarah di SMA Kolose Loyola Semarang, guru terlibat besar dalam penentuan kebutuhan media pembelajaran, karena setiap akan mengawali tahun pelajaran baru, guru-guru di Loyola diberi barang yang harus diisi dengan rencana dan kebutuhan apa yang diinginkan/dilakukan dalam setahun kedepan. Berbeda dengan SMA Negeri 5 Semarang, karena guru-guru sejarah tidak dilibatkan dalam pemenuhan kebutuhan media pembelajaran sejarah, sehingga mereka hanya menggunakan media pembelajaran sejarah yang sudah disediakan sekolah dengan inovasi dan kekefektifitasan guru serta siswa. Apalagi dengan adanya larangan penggunaan dana BOS dan PNBOS yang tak boleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan inventaris atau media dalam pembelajaran sejarah.

6. Penelitian Lilik Elisah Milyani dan Bambang Prishardoyo (2017) dengan judul *“Implementasi Kebijakan Pungutan Biaya di SD N 02 Pododadi Kabupaten Pekalongan”* menyatakan bahwa Implementasi Kebijakan Pungutan Biaya Pendidikan yang difokuskan pungutan dalam pembiayaan pendidikan di SD N 02 Pododadi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Telah di sajikan dan di bahas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Sektor pendidikan dasar, terutama dalam pembiayaan pendidikan yang dialokasikan untuk siswa sekolah sebagai program wajib

belajar 9 tahun yang ada di SD N 02 Pododadi. Pembiayaan dalam pendidikan masih mengandalkan dari APBN seperti dana BOS dan bantuan BKM. Dengan adanya program BOS dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah hanya bertugas sebagai pengawas sekolah yang menerima BOS. Dengan program wajib belajar 9 tahun guna untuk peningkatan mutu pendidikan dasar maka sekolah dasar SD N 02 Pododadi menunjang program peningkatan mutu, sarana dan prasarana yang memadai. (2) Sekolah apabila hanya mengandalkan dana BOS tidak akan mencukupi untuk kemajuan sekolahnya. Oleh karena itu sekolah mengajak partisipasi orang tua siswa untuk memberikan sumbangan, guna mendukung proses pembelajaran sekolah. Namun sumbangan tersebut bersifat memaksa, ditentukan besaran dan waktunya.

7. Penelitian Durotun Nafisah dkk (2017) dengan judul “ *Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Aliyah*” menyatakan bahwa Penganggaran keuangan di MA Ribhul Ulum Kedungmutih dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yang sistematis. Proses penganggaran keuangan di MA Ribhul Ulum Kedungmutih dimulai dengan mengadakan rapat pleno, mengidentifikasi sumber penerimaan madrasah, mengidentifikasi pengeluaran madrasah, menyusun RAPBM, mengusulkan RAPBM, melakukan revisi RAPBM, hingga pada tahap pengesahan RAPBM.
8. Penelitian Isti Hidayah dkk (2014) dengan judul “*Analisis Pembiayaan di Kota Semarang*” menyatakan bahwa Ketersediaan anggaran dana akan

menentukan keberlangsungan semua komponen terjadinya perencanaan, pelaksanaan, kontrol, evaluasi, dan pengembangan pendidikan di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan antara lain untuk: (1) mengetahui persepsi stakeholder terhadap pemenuhan standar pembiayaan pendidikan, (2) persepsi stakeholder terhadap pemenuhan standar implementasi kurikulum, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar pengelolaan pelaksanaan pendidikan satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Semarang, dan (3) menentukan satuan biaya pendidikan persiswa SMA di Kota Semarang agar pembelajaran dapat terlaksana secara teratur dan berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan sampel adalah populasi, yaitu 16 SMA negeri di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sudah baik dengan skor rata-rata di atas 4 (skor maksimal 5), namun dalam rangka mengoptimalkan mutu pendidikan, perlu diperhatikan standar pembiayaan dan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Dengan interval keyakinan 95% biaya pendidikan siswa berada dalam interval Rp2.148.753,- hingga Rp3.184.025,- pertahun dan Rp179.063,- hingga Rp265.335,- perbulan. Perlu ditingkatkan besaran dana Biaya Operasional siswa (BOS), yang baru memenuhi biaya operasional pendidikan 77,3% dari batas terendah biaya operasional dan 19,10% dari batas terendah biaya operasional dan personal hasil penelitian.

9. Penelitian Panuntun Nur Karomah (2017) yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Pada Era Otonomi Daerah”* menyatakan bahwa Pelaksanaan BOS diimplementasikan berdasarkan RKAS dan RAPBS, dan BKM berdasarkan penjangkaran dari pihak sekolah. Dana BOS bersumber dari APBN (pemerintah pusat), BKM bersumber dari APBD Kabupaten (pemerintah daerah) dan sumbangan sukarela bersumber dari masyarakat. Alokasi dana BOS setiap sekolah berbeda-beda, yang mempengaruhi hal itu adalah perbedaan jenjang sekolah, banyaknya jumlah siswa yang ada di sekolah, perbedaan letak lokasi. Hal ini, karena setiap sekolah mempunyai perbedaan kebutuhan operasional sekolah dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sekolah. Sumbangan sukarela untuk memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan sekolah. Alokasi dana BKM tepat sasaran, namun waktu alokasi pencairannya kurang efektif.
10. Penelitian Mugiri dan Wahyu Lestari (2013) yang berjudul *“Instrumen Evaluasi Program dana BOS Model CIPP”* menyatakan bahwa evaluasi pelaksanaan program bantuan dana BOS di SD Kota Pekalongan dilakukan dalam bentuk monitoring yang dilakukan oleh Bawasda (Badan Pengawasan Daerah) dibantu oleh dinas pendidikan kota Pekalongan. Monitoring dilaksanakan tiap triwulan dengan melihat hasil pelaporan pelaksanaan program dana BOS yang diserahkan kepada dinas pendidikan. Laporan penggunaan dana BOS dijadikan sebagai bukti telah digunakannya dana BOS tersebut, tanpa melihat bukti fisik dan kesesuaian antara laporan dengan

bukti fisik. Sehingga sering terjadi adanya manipulasi data laporan. Kendala yang sering dihadapi oleh panitia pelaksana BOS adalah untuk menyediakan bukti pembayaran sesuai dengan proposal yang diajukan, padahal seringkali terjadi ketidaksesuaian harga antara harga di proposal dengan harga riil setelah mengalami kenaikan harga. Kedua, pengembangan instrumen evaluasi pelaksanaan program bantuan dana BOS di SD Negeri Kota Pekalongan belum ada bentuk yang baku. Untuk itu perlu dikembangkan adanya instrumen evaluasi program BOS yang baku. Ketiga, instrumen evaluasi pelaksanaan program bantuan dana BOS di SD Negeri Kota Pekalongan model CIPP valid dan reliabel. Dari hasil uji ahli (*expert judgment*) diperoleh hasil bahwa ketiga validator menyimpulkan bahwa instrumen yang dibuat dapat digunakan dengan revisi kecil. Dapat dikatakan bahwa instrumen evaluasi pelaksanaan program BOS yang dibuat telah memenuhi syarat valid dan reliabel sehingga layak digunakan sebagai instrumen yang baku dalam evaluasi pelaksanaan program BOS di SD Negeri kota Pekalongan.

11. Penelitian Pratiwi Chrisnanda Nurmaunel (2013) dengan judul "*Penggunaan Buku Sekolah Elektronik (BSE) sebagai Sumber Belajar dalam Proses Pembelajaran IPS Sejarah di SMP Negeri 1 Batang*" menyatakan bahwa SMP Negeri 1 Batang merupakan salah satu sekolah di Kabupaten Batang yang telah mendapatkan rekomendasi oleh pemerintah untuk menggunakan Buku Sekolah Elektronik (BSE) sebagai sumber belajar dalam proses

pembelajarannya. Tipe BSE yang digunakan sebagai sumber belajar merupakan versi cetakannya atau *hard copy*. Sekolah menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah untuk membeli buku-buku versi cetak BSE. Siswa hanya diperbolehkan untuk meminjam buku tersebut di Perpustakaan Sekolah. Ketersediaan BSE di SMP Negeri 1 Batang tergolong mencukupi jumlah siswa namun hanya satu jenis buku saja yang digunakan, misalnya untuk pembelajaran IPS Sejarah kelas IX buku teks yang digunakan adalah BSE IPS kelas IX karangan Sanusi Fattah, Jono Trimanto, Juli Waskito dan M. Tankil Setyawan. Buku teks tersebut merupakan buku wajib bagi siswa kelas IX. Hampir semua pelajaran menggunakan buku tersebut sebagai sumber belajar wajib pada kegiatan pembelajaran. Akan tetapi tidak semua jenis buku BSE terdapat versi cetaknya, sehingga diperlukan koleksi buku-buku BSE dengan versi *soft copy* yang bisa dimiliki dengan *mendownload* di situs BSE.

12. Penelitian Rosidah Nurul Latifah (2017) yang berjudul "*Manajemen Kegiatan Ekstrakurikuler Bahasa Inggris di SMK Negeri 7 Semarang*" menyatakan bahwa Pendanaan kegiatan ekstrakurikuler pada SMA Negeri 7 Semarang dibebankan kepada sekolah yaitu menggunakan dana komite sekolah dan dana BOS. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 tahun 2008 bab V pasal 6 ayat 1 bahwa "pendanaan pembinaan kesiswaan di sekolah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)". Pengorganisasian kegiatan ekstrakurikuler pada

SMK Negeri 7 Semarang bersifat fungsional karena wewenang kepala sekolah untuk mengelola kegiatan ekstrakurikuler dilimpahkan kepada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan berhak mengkoordinasikannya dengan koordinator dan guru ekstrakurikuler.

13. Penelitian Taufiq 2014 Arinoto yang berjudul "*Pengaruh Fasilitas Sekolah dan Lingkungan Sekolah terhadap Kepuasan Siswa Melalui Mutu Layanan di SMA Swasta Sekecamatan Pedurungan Kota Semarang*" menyatakan bahwa Siswa SMA swasta sekecamatan Pedurungan kota Semarang banyak yang mengeluh atas layanan sekolah seperti lingkungan sekolah yang terlalu ramai dan kurang terawat, kinerja pegawai sekolah yang rendah, fasilitas yang kurang memadai dan kurangnya daya tanggap guru. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menguji hipotesis yang diajukan berdasarkan teori. Populasi penelitian ini adalah siswa SMA swasta di kecamatan Pedurungan kota Semarang sebanyak 149 orang, sedangkan sampel 105 orang diambil secara proportional random sampling. Data dikumpulkan dengan angket. Analisis data menggunakan analisis jalur dengan bantuan spss 21. Hasil penelitian yang direkomendasikan adalah fasilitas sekolah berpengaruh langsung terhadap kepuasan siswa dengan nilai koefisien jalurnya sebesar 0,331. Saran yang dapat disampaikan yaitu setiap sekolah perlu memperbaiki fasilitas layanan sekolah dengan cara memanfaatkan dana BOS layanan sekolah menjadi lebih bermutu untuk meningkatkan kepuasan siswa.

14. Menurut Nisimura 2006 yang berjudul “ *Considering Equity in Basic Education Reform in Japan From the Perspective of Private Costs of Education*” biaya pendidikan dibagi menjadi tiga komponen, yaitu: biaya sekolah langsung, kontribusi rumah tangga, dan biaya tidak langsung. Biaya langsung dari sekolah adalah pengeluaran oleh orang tua pada pendidikan anak-anak mereka, seperti untuk biaya sekolah (Biaya kuliah dan biaya sekolah lainnya), buku pelajaran dan tambahan panduan belajar, menulis persediaan, seragam, tas sekolah dan angkutan. Kontribusi rumah tangga ke sekolah, dalam bentuk tunai atau barang, dari keluarga ke sekolah-sekolah dan / atau personil sekolah. Biaya pribadi langsung dari sekolah mengacu nilai ekonomi dari peluang yang harus dilepaskan sebagai hasil dari sekolah. Dalam konteks Jepang, biaya langsung dari sekolah juga akan termasuk untuk pendidikan tambahan, seperti sekolah bimbingan. Ada juga biaya kesempatan karena Jepang telah mempertahankan sistem pendidikan wajib yang dari SD (6 tahun) dan SMP (3 tahun) sejak 1947 dan biaya pekerja anak tidak berlaku sejak anak tenaga kerja yang tidak diizinkan atau diterima secara sosial. Demikian, biaya tidak langsung yang dikeluarkan dari analisis. Ada kesenjangan yang cukup besar antara publik dan swasta sekolah di Jepang dalam jumlah biaya langsung dan rumah tangga kontribusi.
15. Hasil penelitian Scott (2008) yang berjudul “*Financial education in small ethnic minority businesses in the UK*” menunjukkan bahwa pemilik bisnis mikro memiliki pencapaian prestasi pendidikan yang lebih rendah sama

dengan kebutuhan pembiayaan pendidikan. Sebaliknya pemilik bisnis lingkup yang lebih kecil, relatif memiliki pencapaian pendidikan yang lebih baik beserta pembiayaan pendidikan.

16. Jonson (2013) dengan judul "*CEO business education and firm financial performance: a case for humility rather than hubris*" mengatakan bahwa pendidikan tidak terlalu ditekankan sebagai prasyarat untuk praktek manajemen yang baik. Hal ini juga membuktikan bahwa di tingkat CEO manajemen pendidikan yang diterima siswa tidak sesuai dengan kepemimpinan.
17. Gemmell (2005) dengan judul "*Publicly financed education in an endogenous growth model*" menyatakan bahwa investasi publik dan pembangunan pada umumnya dibiayai oleh pajak dan pendapatan modal. Bentuk semi reduce digunakan untuk memperoleh keseimbangan pertumbuhan model properti dengan pengaruh dan efek kebijakan fiskal pemerintah yang diberlakukan. Spesifikasi dari produksi modal dan pertumbuhan jumlah tenaga kerja berperan memberikan dampak yang ditunjukkan dengan pengeluaran pemerintah .
18. Holowczak (2000), dalam judul "*Using Reuters 3000 Xtra system for financial information education*", mengatakan informasi keuangan disiapkan dengan anggota internal maupun eksternal, pelayanan informasi keuangan itu dimaksud untuk membuat keputusan bisnis dan keuangan. Dengan menggunakan informasi keuangan lembaga dan investor lah yang membuat

keputusan investasi , direktur mrmbuat membuat pembayaran dan perolehan keputusan. Analisis keuangan membuat ekstimasi dan usulan perbaikan bidang penjualan maupun pembelian.

19. Brunsen, (1988), dengan judul "*Education of the Financial Planner*" mengatakan bahwa rata-rata responden menawarkan lebih dari satu atau dua mata kuliah dan ini kelihatannya banyak termasuk penganggaran pribadi atau mata kuliah pengembangan diri daripada bagian kurikulum untuk perencanaan keuangan pribadi yang profesional.
20. Rowlingson (2013) dengan judul "*Children and Financial Education: Challenges for Developing Financial Capability in the Classroom* " mengatakan pendidikan keuangan dapat dilihat dari dan dengan pembuatan kebijakan publik sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan keuangan warga negara di sebuah wilayah .
21. Akinkugbe (2000), "*Higher education financing and equality of educational opportunities in Swaziland*" Artikel ini disusun sebagai upaya untuk menguji tingkat kemampuan keuangan dalam sistem pendidikan di swiss, dan juga penjumlahan keuangan rumah tangga yang berkontribusi terhadap biaya pendidikan. Isu ditemukan bahwa sumber keuangan sistem pendidikan berasal dari sumber tradisional, pemerintah lokal, rumahtangga, organisasi non pemerintah dan lembaga internasional.
22. Penelitian Wen Wang and Zhirong (Jerry) Zhao (2011) dengan judul "*Fiscal effects of local option sales taxes on school facilities funding: The*

case of North Carolina” mengungkapkan bahwa Sejak tahun 1970-an, Badan Legislatif North Carolina telah memberi wewenang kepada kabupatennya untuk memungut empat pajak penjualan opsi lokal (HILANG). Hasil dari dua dari mereka sebagian dibatasi untuk kebutuhan modal sekolah; dua HILANG lainnya digunakan untuk menambah pendapatan umum kabupaten yang juga dapat mempengaruhi pendanaan modal sekolah. Pengalaman dari negara-negara lain telah menimbulkan kekhawatiran bahwa adopsi HILANG dapat meningkatkan ketidaksetaraan dalam keuangan sekolah, tetapi hasil empiris telah beragam. Menggunakan seperangkat data seratus distrik sekolah kabupaten North Carolina dari 2004 hingga 2006, studi ini meneliti bagaimana fasilitas sekolah umum didanai, dan menyelidiki apakah adopsi LOST memperburuk atau mengurangi ketidaksetaraan dalam pendapatan modal sekolah umum di negara bagian.

23. Penelitian Gloria Agyemang(2010) dengan judul “*Accounting for needs? Formula funding in the UK schools sector*” menyatakan bahwa Tujuan– Tujuan makalah ini adalah untuk menganalisis apakah pengembangan formulasi pendanaan berbasis kebutuhan untuk alokasi sumber daya menggabungkan kebutuhan penyandang dana atau kebutuhan penyedia layanan. Desain / metodologi / pendekatan - Makalah ini menganalisis data wawancara dan bukti dokumenter yang dikumpulkan dari otoritas pendidikan lokal Inggris tentang penciptaan formula "berbasis kebutuhan" untuk berbagi sumber daya ke sekolah. Ini mempekerjakan dan memperluas

kerangka kerja yang dikembangkan oleh Levac̃ic dan Ross untuk mengevaluasi pendanaan formula berbasis kebutuhan. Temuan— Meskipun pendanaan formula dimaksudkan sebagai metode alokasi sumber daya yang lebih obyektif, makalah ini menemukan bahwa seperti metode alokasi sumber daya lainnya, hubungan kekuasaan antara pemberi dana dan penyedia layanan berdampak pada sejauh mana kebutuhan penyedia layanan dimasukkan ke dalam formula pendanaan. Batasan / implikasi penelitian— Makalah ini hanya mempertimbangkan pendanaan sekolah. Pekerjaan lebih lanjut diperlukan untuk menyelidiki pendanaan formula untuk layanan publik lainnya. Implikasi praktis— Debat antara penyandang dana dan penyedia layanan harus didorong oleh pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa alokasi berdasarkan formula pendanaan dapat diterima oleh penyedia layanan. Orinalitas / nilai - Makalah ini memberikan analisis yang berguna dari formula pendanaan berbasis kebutuhan untuk alokasi sumber daya di sekolah dan apakah ini menggabungkan kebutuhan penyandang dana atau kebutuhan penyedia layanan.

24. Penelitian Gede Andreyan Semara Bhawa dkk (2014) yang berjudul “*Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Sukasada*” menyatakan bahwa (1) pengelolaan dana BOS pada seluruh sekolah dasar sudah sesuai dengan Permendiknas No. 76 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dana BOS Tahun 2013, (2) tingkat efektivitas pengelolaan dana

BOS pada seluruh sekolah dasar mencapai 87%, berada dalam kriteria sangat efektif, (3) masalah yang dihadapi seluruh sekolah dasar yaitu dana BOS datang tidak tepat waktu, dan komite kurang memahami pengelolaan dana BOS, (4) upaya yang dilakukan seluruh sekolah dasar yaitu melakukan pinjaman dana serta berbelanja secara kredit, dan melakukan penguatan pada komite terkait dana BOS.

25. Penelitian Sulfiati F, dkk (2010) dengan berjudul "*Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sinjai* " menyatakan bahwa (1) Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kab. Sinjai, meliputi (a) Pelaksanaan pengelolaan dana BOS, (b) Evaluasi pengelolaan dana BOS. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana BOS di sekolah yaitu keterlambatan dalam penyaluran dana BOS dan ICT yang tidak mendukung dalam pengerjaan dan pengiriman pelaporan BOS.

26. Penelitian Afrilliana Fitri (2014) yang berjudul "*PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SEKOLAH DASAR NEGERI KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN KOTA BUKITTINGGI*" menyatakan bahwa Perencanaan Pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi menunjukkan sudah terlaksana dengan baik. Data diperoleh berdasarkan aspek RAPBS dan pengaturan alokasi dana BOS. Dari pengumpulan data, perhatian yang baik

terlihat dalam menetapkan kebutuhan dan kegiatan sekolah untuk pelaksanaan rincian program yang didanai BOS pada RAPBS.

27. Penelitian Ulpha Lisni Azhari dan Dedy Achmad Kurniady (2016) yang berjudul “ *Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran dan Mutu Sekolah* ” mengatakan bahwa Mutu sekolah berkaitan langsung dengan bagaimana kualitas pendidikan pada sebuah satuan pendidikan. Dalam pencapaian mutu sekolah yang baik perlu diperhatikan mutu guru, mutu siswa, kultur dan disiplin sekolah, serta fasilitas dan pembiayaan pendidikan. Penelitian ini memfokuskan pada kajian bagaimana apakah terdapat pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah. Tujuannya untuk mengetahui gambaran dan menganalisis pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel terhadap 33 kepala sekolah SMP pada sub-rayon 1 di Kabupaten Bandung Barat. Teknik analisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah secara bersama-sama memberikan pengaruh yang kuat dan signifikan. Berdasarkan temuan tersebut maka direkomendasikan untuk sekolah agar memperhatikan tahapan manajemen pembiayaan pendidikan terutama pada saat perencanaan dan pengawasan pembiayaan. Sedangkan pada prinsip pemanfaatan fasilitas

perlu diperhatikan efisiensi terhadap penggunaan fasilitas pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan mutu sekolah.

28. Penelitian Ristya Dwi Anggraini (2013) yang berjudul "*Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya*" menyatakan bahwa Transparansi pengelolaan anggaran dana BOS dalam program RKAS di SDN Pacarkeling VIII sangat transparan. Hal tersebut dapat dilihat dari terbukanya informasi mengenai penerimaan dana BOS serta informasi yang disediakan mengenai anggaran dana BOS dalam program RKAS. Sedangkan partisipasi pengelolaan anggaran dana BOS dalam program RKAS, banyak pihak yang berpartisipasi. Hal tersebut dapat dilihat dari terlibatnya masyarakat dalam proses perencanaan anggaran dana BOS dalam program RKAS, Kemudahan bagi masyarakat dalam mengontrol pengelolaan anggaran dana BOS dalam program RKAS, serta akses masyarakat menyampaikan saran, kritik, dan pendapat terkait pengelolaan anggaran dana BOS dalam program RKAS. Dalam akuntabilitas pengelolaan anggaran dana BOS dalam program RKAS dapat dilihat dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS berupa lampiran formulir BOS K-1, K-2, K-06B, dan K-7 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, dan Ketua Komite Sekolah dan mengirimkan kepada UPTD dan Tim BOS Pusat. Serta menempelkan formulir BOS K-1 di papan pengumuman sekolah sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban terkait

penggunaan dana BOS di SDN Pacarkeling VIII. Dan yang terakhir, keterkaitan antara ketiga fokus dalam penelitian ini, yaitu transparansi dapat mendorong peningkatan akuntabilitas publik. Sedangkan partisipasi publik tidak dapat terlaksana tanpa adanya transparansi. Selain itu, akuntabilitas akan sulit terlaksana tanpa pemantauan dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas saling berkaitan dalam menciptakan *Good Governance*.

29. Penelitian Kusno, Masluyah Suib, Wahyudi (2015) dengan judul “*Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri*” menyatakan bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 01 Muara Pawan Kabupaten Ketapang telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang tertuang di dalam buku panduan BOS yang meliputi unsur perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, serta pelaporan dana BOS.

30. Penelitian Muhammad Wirawan, Bambang Satoso Haryono, Minto Hadi (2013) dengan judul “*Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi pada Sekolah Dasar Negeri Percobaan 1 Kota Malang)*” menyatakan bahwa dalam proses pelaksanaan kebijakan dana BOS dari tingkat kota serta tingkat sekolah di SDN Percobaan 1 Kota Malang telah berjalan sesuai dengan semestinya dan sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam Juknis dana BOS. Serta peran

masyarakat dalam hal ini sangat dibutuhkan sebagai masukan serta pengawasan akan program dana BOS.

31. Penelitian Susilawaty, Cut Zahri Harun, Khairuddin (2012) dengan judul *“Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pengelolaan Pembiayaan Sekolah di SD Negeri 4 Kota Banda Aceh”* menyatakan bahwa Perencanaan pembiayaan di SD Negeri 4 Banda Aceh disusun berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. Rencana pembiayaan di SD Negeri 4 Banda Aceh meliputi penganggaran untuk kegiatan pengembangan kompetensi lulusan, pengembangan kurikulum, pengembangan proses pembelajaran, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan sarana dan prasarana sekolah, pengembangan dan implementasi manajemen sekolah, pengembangan dan penggalian sumber dana pendidikan, dan pengembangan dan implementasi sistem penilaian. Penyusunan perencanaan pembiayaan tersebut didasarkan atas susunan prioritas yang sangat mendesak dan lebih diutamakan dalam setiap tahun anggarannya. Pelaksanaan atau pemanfaatan anggaran diawali dengan serangkaian kegiatan pemeriksaan dan persetujuan untuk memastikan bahwa dana dibelanjakan sesuai rencana, dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, dan dana tidak dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak disetujui atau diberikan kepada pihak penerima tanpa persetujuan. Pengevaluasian dilakukan setiap triwulan atau per semester. Dana yang digunakan dipertanggungjawabkan

kepada sumber dana baik pemerintah kota, provinsi, pusat maupun orang tua/wali dan masyarakat

32. Penelitian Arief Januwarso (2015) dengan judul “ *Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri di Kabupaten Bojonegoro*” menyatakan bahwa pelaksanaan tahap persiapan program BOS sudah dilakukan dengan baik dan telah dilakukan sosialisasi dan pelatihan dengan sangat baik. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program BOS telah dilakukan dengan baik, hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan TIM manajemen BOS tingkat kabupaten masih ditemukan ada masalah berkaitan dengan pelaksanaan program BOS dan sudah ada sosialisasi dan rekomendasi pada tim manajemen BOS sekolah untuk melakukan pembahasan, pembukuan dan pembelajaran agar sesuai juknis.
33. Penelitian Ferdi W P (2013) dengan judul “ *Pembiayaan Pendidikan Suatu Kajian Teoritis*” menyatakan bahwa 1) faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan, antara lain: a) kenaikan harga;b) perubahan gaji guru; c) perubahan populasi dan kenaikan prosentasi anak di sekolah negeri;d) meningkatnya standar pendidikan; e) meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah; f) meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi; g) adanya keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan; dan h) belum ada model pembiayaan yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam operasionalisasi biaya pendidikan; 2) jenis-jenis biaya

pendidikan meliputi: a) biaya langsung; b) biaya tidak langsung); c) biaya pribadi; d) biaya masyarakat; e) monetary cost; dan f) non monetary cost; dan 3) model pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien yaitu model human capital di mana aspek pembiayaan dapat mempengaruhi taraf produktivitas yang dapat mempengaruhi taraf pendapatan seseorang atau kelompok sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap kecepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

34. Penelitian Akhmad Fathurohman, Enny Winaryati, Siti Hidayah (2014) dengan judul “ *Analisi Deskriptif Pembiayaan Pendidikan di Kabupaten Blora tahun 2012*” menyatakan bahwa (a) Pembiayaan pendidikan masih bertumpu pada pembiayaan dari pemerintah pusat dan provinsi, di samping itu juga dukungan pembiayaan pendidikan dari dunia usaha dan industri serta perusahaan asing masih relatif rendah, (b) ketepatan waktu pencairan dinilai tidak sesuai dengan kalender pendidikan; (c) kebutuhan tertinggi pembiayaan pendidikan adalah untuk sarana prasarana dan program kurikulum, serta secara khusus untuk pengembangan keterampilan/vokasi pada bagi SMK, (d) pemenuhan pembiayaan untuk mencapai standar pembiayaan masih perlu ditingkatkan. Rekomendasi (a) perlu ada upaya peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan sehingga mendukung semua satuan pendidikan mencapai Standar Nasional, (b) waktu pencairan biaya pendidikan perlu tepat waktu sesuai dengan kalender pendidikan, (c) Perlu peningkatan dukungan dari DU/I dan

perusahaan asing, (e) pembiayaan untuk sarana dan prasarana perlu diprioritaskan.

35. Penelitian Sitti Roskina Mas (2012) yang berjudul “ *Partisipasi Masyarakat dan Orang Tua dalam Penyelenggaraan Pendidikan*” menyatakan bahwa Peran serta masyarakat melalui komite dan dewan pendidikan memiliki posisi yang amat strategis dalam mengembangkan tanggung jawab masyarakat. Iklim demokratis dalam pengelolaan sekolah dicerminkan dalam peran masyarakat pada hal-hal: (1) membangun sikap kepemilikan sekolah, (2) merumuskan kebijakan sekolah, (3) membangun kesadaran mutu, (4) perhatian terhadap kehidupan akademik, dan (5) membangun tata kerja kelembagaan sekolah. Ditegaskan pula dalam Kepmen Diknas tahun 2002 bahwa Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah berperan dalam pemberian pertimbangan pemberian dukungan, pengontrol, dan mediator antara pemerintah dan dewan perwakilan daerah. Lebih khusus ditekankan bahwa komite sekolah bertujuan untuk (1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, (2) meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, dan (3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

36. Penelitian Kaswandi (2015) dengan judul “*Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD Negeri 027 Tarakan*” menyatakan bahwa penyusunan RKAS tepat waktu diawal tahun anggaran, berdasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, serta melibatkan komite dan guru. Aspek pelaksanaan belum seluruhnya berhasil dikarenakan penyaluran dana BOS masih terlambat. administrasi pembukuan sudah sesuai dengan Permendiknas No. 51 Tahun 2011. Aspek pengawasan masih belum berhasil karena belum ada pengawasan dari pihak komite sekolah dan dinas terkait secara berkala. Aktifitas evaluasi oleh pihak komite sudah dilakukan meskipun belum maksimal. Pelaporan pengelolaan dana BOS di SDN 027 dapat dikatakan sudah berhasil dikarenakan sudah membuat laporan sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS sesuai dengan Permendiknas No. 51 Tahun 2011.

37. Penelitian Kiky Bagus Waluyo(2016) dengan judul “*EFEKTIVITAS MANAJEMEN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN (Studi Kasus Pengelolaan Dana BOS di SDN Pacarkeling 1 Surabaya)*” menyatakan bahwa Berdasarkan berbagai fakta yang didapatkan oleh peneliti di lapangan, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Kasus Pengelolaan Dana BOS di SDN Pacarkeling 1 Surabaya) sudah dapat mewujudkan tujuan utama dari Pengelolaan Dana

BOS yaitu Program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dihasilkan telah tepat sasaran, peningkatan kompetensi murid dan kualitas belajar dan bertambahnya tenaga pendidik dalam membantu kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan ketiga kriteria tersebut maka program dan bantuan operasional sekolah di SDN 1 Pacarkeling Surabaya dianggap mencapai target yang diharapkan. Namun, pihak sekolah beranggapan bahwa target-target tersebut terpenuhi bukan berarti membuat pelaksana program berbangga diri. Kebijakan bantuan operasional sekolah akan lebih dimanfaatkan secara selektif dan produktif melebihi target yang telah tercapai. Penerapan itu akan membantu sekolah menjadi lebih unggul dan berkompeten mencetak lulusan yang siap bersaing dan inovatif.

38. Penelitian Rusmala Dewi, Wahyudi, Sukmawati (2017) dengan judul *“PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 8 SUNGAI RAYA”* menyatakan bahwa (1) Perencanaan Dana BOS di Sekolah Dasar Negeri 8 Sungai Raya Kabupaten Kubu raya dilakukan dengan menyusun RKAS oleh tim anggaran sekolah dengan diketahui oleh Komite Sekolah, guru, karyawan, dan orang tua siswa. (2) Pelaksanaan Dana BOS, penyaluran Dana BOS dalam dua tahap. (3) Pengawasan dan Evaluasi dilakukan secara internal oleh Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pelaksanaan secara eksternal dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. (4) Pelaporan Dana BOS SD dilakukan setiap semester melalui LPJ BOS SD beserta lampirannya.

39. Penelitian Sonedi ,Zulfa Jamalie dan Majeri (2017) dengan judul “*Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersumber dari Masyarakat: Studi Pada MTs Darul Ulum Palangka Raya*” menyatakan bahwa dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM) di MTs Darul Ulum Palangka Raya sudah dibuat melalui perencanaan terlebih dahulu yang dilakukan oleh pihak madrasah sebelum dilaksanakan rapat bersama yayasan, komite sekolah dan orang tua, walaupun rancangan anggaran yang dibuat dalam bentuk yang sederhana. Selanjutnya dalam merealisasi anggaran dan pembukuan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua peserta didik di MTs Darul Ulum Palangka Raya Tahun Pelajaran 2015/2016 di lapangan menunjukkan bahwa penggunaannya sudah sesuai dengan kebutuhan dan RAPBM yang dibuat, dalam arti anggaran telah dibuat pembukuannya/*accounting*. Pengawasan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua peserta didik di MTs Darul Ulum Palangka Raya dilakukan secara langsung oleh kepala madrasah. Pengawasan penggunaan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua peserta didik di MTs Darul Ulum Palangka Raya Tahun Pelajaran 2015/2016 dibuat dalam bentuk rekapitulasi realisasi secara global, walaupun pembuatan laporan oleh bendahara mengacu pada catatan pengeluaran yang dibuat sebagai bahan laporan, termasuk dalam hal bukti catatan pengeluaran dana tidak terduga

40. Penelitian Syamsir, Muh. Arifin Ahmad, Andi Cudai Nur (2016) dengan judul “ *PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SMP NEGERI 3 PANCA RIJANG KABUPATEN SIDRAP*” menyatakan bahwa (1) Sekolah Di SMP Negeri 3 Panca Rijang Kabupaten Sidrap, telah melaksanakan program bantuan operasional sekolah (BOS) dengan baik yaitu sesuai dengan aturan pemerintah yang dimuat dalam petunjuk teknis Pengelolaan bantuan operasional sekolah (JUKNIS pengelolaan BOS tahun 2017). Meskipun masih ada beberapa yang perlu dibenahi seperti salah satunya peran komite sekolah sebagai pengelolah dan sekaligus pengawas dana BOS diharapkan dapat membuka informasi tentang dana BOS kepada orang tua siswa guna menjaga transparansi, dan seluruh pengelolah anggaran dana BOS harus benar-benar memperhatikan prinsip-prinsip dalam pemanfaatan anggaran sehingga dana dapat berfungsi lebih maksimal (2) faktor-faktor pendukung pelaksanaan program bantuan operasional sekolah Di SMP Negeri 3 Panca Rijang Kabupaten Sidrap yaitu. (a) Dukungan Pemerintah dengan memberikan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS dan sosialisasi tentang tatacara pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dari Dinas Pendidikan (b) terjalinnya bentuk kerja sama yang baik dari pihak pengelolah dana BOS, Komite Sekolah dan para Guru, Pemerintah (Dinas Pendidikan) (c) motivasi yang tinggi dan kinerja yang maksimal untuk mengembangkan kualitas pendidikan, (d) dukungan dari para guru baik dengan sumbangan pemikiran maupun dengan dukungan

tenaga. (3) faktor penghambat dalam pelaksanaan program bantuan operasional sekolah yaitu; (a) waktu pencairan dana sering mengalami keterlambatan, (b) Anggaran yang diperoleh tidak sebanding dengan kebutuhan sekolah (c) sekolah dibatasi dalam melakukan perbaikan berat sehingga sekolah masih mengalami kekurangan ruangan, dan (d) Dana bantuan operasional sekolah belum mampu membiayai seluruh program sekolah secara merata/menyeluruh.

2.2 Kerangka Teoretis

2.2.1 Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan terbentuk dari dua kata manajemen dan pendidikan. Manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat, dan profesi. Dikatakan sebagai ilmu, menurut Luther Gulick dalam (Sagala, 2011: 50) karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. Usman (2009:12) mengartikan manajemen pendidikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara lebih efektif dan efisien. Manajemen pendidikan diartikan sebagai proses pendayagunaan sumberdaya sekolah melalui kegiatan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian secara lebih efektif dan efisien dengan segala aspeknya dengan menggunakan semua potensi yang tersedia agar tercapai tujuan

organisasi secara efektif dan efisien serta produktivitas sekolah yang bermutu (Sagala, 2009:55).

Sementara menurut Arikunto (2009:4) manajemen pendidikan adalah rangkaian segala kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergolong dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, agar efektif dan efisien.

Secara Umum Manajemen Pendidikan yaitu proses penyelenggaraan pendidikan melalui tahap-tahap perencanaan, pengorganisasian sampai dengan evaluasi dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2.2.1.1 Fungsi Manajemen

1. Perencanaan (*Planning*)

Menurut Terry (dalam S. Robin, 2001: 3), perencanaan adalah suatu keharusan dalam setiap usaha untuk mengembangkan usaha atau mengembangkan lembaga tersebut. Karena perencanaan bersifat vital, seharusnya hal itu dibuat lebih awal. Perencanaan dapat dianggap sebagai suatu kumpulan keputusan-keputusan, dalam hubungan mana perencanaan tersebut dianggap sebagai tindakan untuk mempersiapkan tindakan-tindakan untuk masa yang akan datang dengan jalan membuat keputusan sekarang. Robbin (2001: 3) menyatakan bahwa fungsi perencanaan meliputi menetapkan tujuan organisasi, menetapkan suatu strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan dan

mengembangkan suatu hirarki rencana yang menyeluruh untuk memadukan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan.

Menurut Suharsimi (2008:9) Perencanaan adalah proses mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan untuk dilakukannya tindakan dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan atau tanpa menggunakan sumber-sumber yang ada. Aspek-aspek perencanaan meliputi: a) apa yang akan dilakukan, b) siapa yang harus melakukan, c) kapan dilakukan, d) dimana dilakukan, e) bagaimana melakukan, dan f) apa saja yang perlu dilakukan agar tercapai tujuannya secara maksimal. Dari pengertian tersebut fungsi perencanaan adalah aktifitas atau kegiatan yang berupa proses penentuan program kerja. Disinilah peran guru sebagai penggerak dan penyelenggara manajemen pendidikan sangat dibutuhkan. Dalam perencanaan pendidikan di sekolah secara umum melibatkan seluruh komponen sekolah termasuk guru dimana pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif yaitu cara untuk mengambil keputusan melalui penciptaan lingkungan terbuka dan demokratis sehingga diharapkan warga sekolah ikut terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan yang akhirnya berkontribusi terhadap pencapaian tujuan sekolah.

Menurut Nanang (2013 : 49) perencanaan merupakan tindakan menetapkan tujuan terlebih dahulu apa yang dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, apa yang harus dikerjakan dan siapa yang harus mengerjakannya. Perencanaan juga sering juga disebut sebagai jembatan yang menghubungkan

kesenjangan atau jurang antara keadaan masa kini dan keadaan yang diharapkan terjadi pada masa yang akan datang. Dalam setiap perencanaan selalu terdapat tiga kegiatan yang meskipun dibedakan , tetapi tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya dalam proses perencanaan. Ketiga kegiatan itu adalah (1) perumusan tujuan yang ingin dicapai ; (2) pemilihan program untuk mencapai tujuan itu ; (3) identifikasi dan pengerahan sumber yang jumlahnya selalu terbatas. Perencanaan yang baik hendaknya memperhatikan sifat-sifat dan kondisi yang akan datang, dimana keputusan dan tindakan efektif dilaksanakan. Itulah sebabnya berdasarkan kurun waktunya dikenal perencanaan tahunan atau jangka pendek (kurang dari 5 tahun), rencana jangka menengah (5-10 tahun) dan rencana jangka panjang (diatas 10 tahun).

Perencanaan adalah proses memikirkan dan menetapkan kegiatan-kegiatan atau program-program yang akan dilakukan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu (Sagala, 2006:56). Perencanaan menurut Sagala, 2006: 57 adalah kegiatan menentukan sasaran dan alat sesuai untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dari uraian di atas dapat didefinisikan bahwa perencanaan merupakan sebuah proses yang dilakukan secara sistematis terarah dan berkesinambungan untuk menyusun rencana dan tujuan dari sebuah program yang disusun oleh sebuah lembaga atau organisasi yang meliputi tujuan, kebutuhan sumber daya, biaya dan sarana yang dimiliki.

Perencanaan dalam konteks efektifitas penyaluran dana bantuan Operasioanl Sekolah, tahapan perencanaan yang harus dilakukan oleh Kepala Sekolah yakni : perencanaan staf pengelolaan dana BOS, perencanaan biaya, perencanan siswa penerima dana BOS dan perencanaan pemanfaatan dana BOS dalam pembelajaran, perencanaan evaluasi penggunaan dana BOS. Perencanaan dana BOS dilakukan secara bersama oleh pihak sekolah dan komite sekolah melalui rapat untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai rencana pengalokasian dana BOS tersebut. Hal ini bertujuan agar pengalokasian dana BOS dapat diterima oleh semua elemen yang berhubungan dengan sekolah. Perencanaan penggunaan dana BOS dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk penggunaan dana BOS yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasioanal.

2. Pelaksanaan (*Actuating*)

Menurut Terry (2010: 20) *actuating* adalah usaha untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam suatu lembaga, kalau hanya ada perencanaan atau organisasi saja tidak cukup. Untuk itu dibutuhkan tindakan atau *actuating* yang konkrit yang dapat menimbulkan action. Hal dasar bagi tindakan menggerakkan adalah manajemen yang berpandangan progresif. Maksudnya adalah para pengelola harus menunjukkan melalui kelakuan dan keputusan-keputusan mereka bahwa mereka mempunyai perhatian yang dalam untuk anggota-anggota organisasi mereka. Pada dasarnya

actuating dimulai dari dalam diri pribadi masing-masing. Pengelola harus dimotivasi secara pribadi untuk mencapai kemajuan dan untuk bekerjasama secara harmonis dan terarah dengan pihak lain, karena apabila tidak demikian halnya, tidak mungkin untuk menggerakkan pihak lain. Memang harus diakui bahwa sulit sekali untuk menggerakkan diri sendiri (to be actuated). Untuk mencapai sukses terbesar dalam actuating, orang senantiasa harus bersikap obyektif dalam penentuan dan penggunaannya. Actuating berhubungan erat dengan sumberdaya manusia yang pada akhirnya merupakan pusat aktivitas aktivitas jalannya manajemen. Menggerakkan menimbulkan tantangan dan daya pikat yang luar biasa. Nilai-nilai, sikap, harapan, kebutuhan, ambisi, kepuasan seseorang dalam interaksinya dengan orang lain dan dengan lingkungan fisik kesemuanya bertautan dengan proses menggerakkan. Fungsi dari Pelaksanaan (actuating) adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan
2. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan
3. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan
4. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

Penggerakan/pengarahannya adalah fungsi manajemen yang terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen. Fungsi ini baru dapat diterapkan setelah rencana, organisasi, dan karyawan ada. Jika fungsi ini diterapkan maka proses manajemen dalam merealisasi tujuan dimulai. Penerapan fungsi ini sangat sulit, rumit, dan kompleks, karena karyawan-karyawan tidak dapat dikuasai sepenuhnya. Hal ini disebabkan karyawan adalah makhluk hidup yang punya pikiran, perasaan, harga diri, cita-cita, dan lainnya. Pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatan alat-alat bagaimanapun canggihnya baru dapat dilakukan jika karyawan (manusia) ikut berperan aktif melaksanakannya. Fungsi pengarahannya ini adalah ibarat starter mobil, artinya mobil baru dapat berjalan jika kunci starternya telah melaksanakan fungsinya. Demikian juga proses manajemen, baru terlaksana setelah fungsi pengarahannya diterapkan (Hasibuan. 2009 ; 41)

Pelaksanaan menurut Sudjana (2004 : 70-73) merupakan suatu rangkaian pembelajaran yang dilakukan secara berkesinambungan. Dalam pelaksanaan pengelolaan terdapat serangkaian kegiatan yang satu sama lainnya berkaitan diantaranya pengorganisasian, pergerakan dan pembinaan.

Jadi secara umum pelaksanaan atau *actuating* merupakan kegiatan yang dilakukan untuk untuk menggerakan unsur-unsur yang ada dalam lembaga atau Sekolah Dasar yang dilakukan secara terarah, berkesinambungan dan saling berkaitan antara unsur yang satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal.

Berkaitan dengan penyaluran dana BOS, pelaksanaan (*Actuating*) yaitu melanjutkan hasil keputusan rapat mengenai alokasi dana BOS sebagaimana direncanakan dan kapan diterimanya. Dalam hal ini, dana BOS diserahkan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk membagikan dana BOS kepada yang berhak menerima.

3. Evaluasi

Evaluasi yaitu kegiatan untuk mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan informasi tentang sesuatu yang terkait bagaimana bekerjanya perangkat dan instrumen program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan (Fakhrudin ,2011 : 2). Menurut Rivai (2007 : 3) evaluasi merupakan proses pengumpulan data atau informasi untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan atau nilai tambah dari kegiatan pendidikan. Untuk mencapai ke arah itu evaluasi merupakan kegiatan yang sistematis dan kompleks. Sistematis karena evaluasi menggunakan teknik-teknik atau prosedur yang inkuiri secara runtut. Kompleks karena evaluasi bukan sekedar kegiatan yang berkaitan dengan perumusan tujuan, perumusan tes, atau analisis data, melainkan lebih dari itu yakni mencakup kegiatan pembuatan keputusan tentang nilai.

Sutarto (2008 : 181) berpendapat bahwa evaluasi yaitu usaha pengumpulan informasi dan penjajagan informasi untuk mengetahui dan memutuskan cara yang efektif dalam menggunakan berbagai sumberdaya yang tersedia guna mencapai tujuan pembelejaraan secara keseluruhan. Evalausi

pelaksanaan program berusaha mendapatkan informasi-informasi mengenai hasil-hasil program pembelajaran kemudian menggunakan informasi itu dalam penilaian. Evaluasi program dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan dapat tercapai dan melihat keefektifan program tersebut. Dalam hal ini evaluasi pelaksanaan program tidak hanya untuk mengukur terjadinya perubahan perilaku tetapi juga melihat efektifitas pelaksanaan program yang telah berjalan.

Tujuan Evaluasi menurut Steve (1994 : 18) yaitu menunjukkan kinerja program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, memutuskan apakah dilanjutkan atau tidak suatu program, dan memperoleh informasi bagaimana meningkatkan program di masa depan.

Sedangkan menurut Sudijono (2011 ; 16) tujuan evaluasi dibagi menjadi dua yaitu secara umum dan secara khusus .

1. Secara umum tujuan evaluasi dalam bidang pendidikan ada dua , yang pertama untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami oleh peserta didik, setelah mengikuti proses pembelajaran dalam waktu tertentu. Dengan kata lain, tujuan umum evaluasi dalam pendidikan adalah untuk memperoleh pembuktian , yang akan menjadi petunjuk sampai mana tingkat kemampuan dan tingkat keberhasilan peserta didik dalam menempuh tujuan-tujuan kurikuler, setelah mereka menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu yang ditentukan. Kedua untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam

proses pembelajaran selama jangka waktu tertentu. Jadi tujuan umum yang kedua dari evaluasi pendidikan yaitu untuk mengukur dan menilai sampai dimanakah efektivitas mengajar dan metode-metode mengajar yang telah diterapkan dan dilaksanakan oleh pendidik, serta kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh peserta didik.

2. Secara khusus tujuan evaluasi pendidikan adalah untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Tanpa adanya evaluasi maka tidak mungkin timbul kegairahan atau rangsangan pada diri peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya masing-masing. Untuk mencari dan menemukan factor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan, sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atau cara perbaikan lainnya.

Sudijono (2011 ; 17) menjabarkan bahwa evaluasi memiliki kegunaan, diantara kegunaan yang dapat dipetik dalam evaluasi bidang pendidikan yaitu :

1. Terbukanya kemungkinan bagi evaluator guna memperoleh informasi tentang hasil-hasil yang telah dicapai dalam rangka pelaksanaan program pendidikan.
2. Terbukanya kemungkinan untuk dapat diketahuinya relevansi antara program pendidikan yang telah dirumuskan dengan tujuan yang ingin dicapai.
3. Terbukanya kemungkinan untuk dapat dilakukan usaha perbaikan , penyesuaian dan penyempurnaan program pendidikan yang dipandang lebih berdaya guna dan lebih berhasil guna, sehingga tujuan yang dicita-citakan akan dapat dicapai dengan hasil yang sebaik-baiknya.

Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses yang terstruktur dan terarah untuk melakukan koreksi dan perbaikan sebuah program atau kegiatan melalui pengumpulan data dan informasi yang kemudian dianalisis berdasarkan tujuan dan cita-cita yang diharapkan.

Berkait dengan penyaluran dana BOS, evaluasi yang dilakukan adalah sejak dimulainya program penyaluran dana BOS memang program ini memberikan manfaat yang bisa langsung dirasakan oleh pihak sekolah dan masyarakat. Ada beberapa output yang dirasakan baik dari pihak sekolah dan masyarakat selaku walimurid di SDN Girirejo 02 yakni: Meringankan biaya operasional sekolah, Peningkatan Mutu melalui Program Sekolah dan Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Sekolah. Akan tetapi evaluasi yang harus dilakukan berkaitan dengan efektifitas penyaluran dana BOS yaitu sudahkah penyaluran dana BOS sesuai dengan RAPBS dan pelaporan pertanggungjawaban BOS.

2.2.2 Pembiayaan Pendidikan

Pengertian biaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 186) adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan) sesuatu, ongkos belanja, dan pengeluaran. Sedangkan definisi pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 187) merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.

2.2.3 Sumber – sumber Biaya Pendidikan

Operasi program pendidikan suatu sekolah memerlukan dana untuk berbagai macam keperluan seperti , pembiayaan gaji, pengadaan sumber daya material yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program pengajaran sekolah. Disamping untuk keperluan gaji dan pengadaan material, masih banyak lagi dana yang harus dikeluarkan untuk berbagai keperluan. Adapun menurut buku Pembiayaan Pendidikan di Indonesia sumber pembiayaan dibagi menjadi 4 yaitu :

1. Hasil penerimaan umum pemerintah, pada dasarnya merupakan sumber yang terpenting untuk pembiayaan pendidikan, seperti semua penerimaan pemerintah baik pajak, bantuan luar negeri maupun pinjaman dari pemerintah. Besarnya biaya dan penerimaan pemerintah ditentukan oleh aparat keuangan pemerintah ditingkat pusat maupun daerah, yang dipertimbangkan berdasarkan prioritas-prioritas pendidikan dibandingkan dengan kegiatan pemerintah.
2. Penghasilan pemerintah khusus berupa bantuan atau pinjaman dari luar negeri yang diperuntukkan untuk pendidikan, seperti bantuan UNICEF atau UNESCO, pinjaman dari Bank Dunia dan sebagainya.
3. Iuran sekolah adalah pembayaran orang tua murid langsung kepada sekolah, berdasarkan jumlah anak mereka yang dididik di sekolah tersebut. Keputusan mengenai sekolah yang mana anak-anak mereka akan dididik dan apakah iuran sekolah tersebut akan dibayar adalah hak orang tua murid. Walaupun jumlah iuran biasanya di tentukan oleh

pemerintah, sekolah atau yayasan. Peran orangtua murid dalam menentukan jumlah biaya kepada anggota badan sekolah, atau yayasan.

4. Sumbangan-sumbangan sukarela lainnya, termasuk juga sumbangan perorangan, sumbangan dari masyarakat, berupa uang tunai, barang-barang, jasa-jasa, hadiah dan segala usaha sekolah sendiri untuk mengumpulkan dana.

Sekolah Dasar Negeri (SD) pada umumnya memiliki sumber-sumber anggaran penerimaan, yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, serta orangtua murid. Sedangkan anggaran dasar pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah.

Pembiayaan pendidikan (*educational finance*), yakni sumber biaya pendidikan. Revenue untuk membiayai kegiatan pendidikan diperoleh dari berbagai sumber. Untuk biaya pendidikan sekolah, sumber-sumber yang dapat diandalkan untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan berasal dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, orangtua, masyarakat dan swasta. Mengenai sumber-sumber biaya pendidikan sekolah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pembiayaan Pendidikan dari Pemerintah Pusat

Menurut Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, maka pengelolaan pendidikan menengah diserahkan kepada pemkab/pemkot. Aliran dana dari pusat ke daerah dilakukan melalui mekanisme

dana perimbangan, khususnya melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut UU No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, selain DAU, dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah adalah dana bagi hasil dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sumber penerimaan daerah lainnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pinjaman daerah. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD. Mekanisme lainnya adalah pelaksana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pemprov selain melaksanakan tugas desentralisasi, sekaligus juga melaksanakan tugas dekonsentrasi yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Provinsi. Sekolah mendapat dana subsidi untuk Ujian Nasional (UN), beasiswa baik beasiswa berprestasi maupun beasiswa untuk kurang mampu. Bantuan untuk murid didapat dari pemerintah pusat untuk siswa yang secara ekonomi kurang mampu baik SD negeri maupun swasta. Dana ini merupakan dana kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Selain itu, sekolah mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS merupakan program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar 9 tahun. Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi Indonesia. (<http://bos.kemdikbud.go.id/home/about>)

2. Pembiayaan Pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Beberapa program pendidikan yang didanai dari APBD Provinsi Jateng, seperti berbagai macam *workshop* untuk mata pelajaran dan kepala sekolah. Dana subsidi yang diterima sekolah yang bersumber dari pemerintah Provinsi Jateng terdiri dari : dana subsidi pengadaan alat laboratorium, pengadaan buku referensi dan penunjang, sistem manajemen perpustakaan dan beasiswa untuk siswa.

3. Pembiayaan Pendidikan dari Pemerintah Kabupaten/Kota

Biaya pendidikan dari pemerintah kabupaten/kota yang diterima digunakan untuk belanja administrasi umum yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan pemeliharaan. Biaya dari pemkab/pemkot lainnya adalah dana beasiswa untuk siswa dan dana subsidi untuk penyelenggaraan ujian sekolah dan ujian nasional.

4. Pembiayaan Pendidikan dari Orang tua

Biaya yang dikeluarkan Orang tua siswa, yang berupa sumbangan fasilitas belajar siswa, sumbangan pembangunan gedung, iuran BP3, dan SPP.

5. Pembiayaan Pendidikan dari Masyarakat

Biaya pendidikan dari masyarakat meliputi: sumbangan orang tua siswa, sumbangan perusahaan/swasta, dan lainnya. Sumbangan orang tua siswa yang dimaksud adalah dana yang disumbangkan langsung ke sekolah oleh orang tua siswa atau dikenal dengan dana komite sekolah. Dana tersebut terdiri atas Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dan iuran atau dana Operasional

Pendidikan (DOP), untuk SD swasta masih menggunakan istilah Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

Pendapatan SD swasta meliputi berbagai iuran, antara lain: iuran perpustakaan, iuran laboratorium, iuran yang bersifat incidental, seperti iuran saat menjelang ulangan baik tengah semester, akhir semester, maupun menjelang US dan UN, serta iuran perpisahan.

6. Pembiayaan Pendidikan dari Swasta

Biaya pendidikan dari swasta yang dimaksud adalah biaya yang disumbangkan masyarakat (individu, perusahaan, lembaga nonpemerintah, dan lainnya) ke sekolah. Misalnya, PT Pertamina, Sampoerna Foundation memberi beasiswa bagi anak-anak berprestasi, dan sponsor lainnya

2.2.4 Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

1. Transparansi

Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya

keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggung jawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah.

3. Efektivitas

Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner (2004) mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga.

4. Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. *Efficiency* "characterized by quantitative outputs" (Garner, 2004). Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output) atau

antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya.

2.2.5 Keuangan Sekolah

Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar mengajar di sekolah bersama dengan komponen-komponen yang lain. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik itu disadari maupun yang tidak disadari. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan.

2.2.6 Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Pendidikan

Penggunaan anggaran dan keuangan dari sumber manapun, apakah itu dari pemerintah ataupun dari masyarakat perlu didasarkan pada prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan, adapun prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pendidikan menurut Suryana (2008) sebagai berikut :

1. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan.
2. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan.
3. Terbuka dan transparan, dalam pengertian dari dan untuk apa keuangan lembaga tersebut perlu dicatat dan dipertanggungjawabkan serta disertai bukti penggunaannya.

4. Sedapat mungkin menggunakan kemampuan/hasil produksi dalam negeri sejauh hal ini dimungkinkan

2.2.7 Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (RAPBS)

Menurut Suryana (2008) anggaran adalah rencana yang diformulasikan dalam bentuk rupiah dalam jangka waktu atau periode tertentu, serta alokasi sumber-sumber kepada setiap bagian kegiatan. Anggaran memiliki peran penting di dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan yang dilakukan sekolah. Sekolah bersama komite atau majelis sekolah pada setiap awal tahun anggaran perlu bersama-sama merumuskan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (RAPBS) sebagai acuan bagi pengelola sekolah dalam melaksanakan manajemen keuangan sekolah yang baik.

2.2.8 Pertanggung Jawaban Keuangan Sekolah

Semua pengeluaran keuangan sekolah dari sumber manapun harus dipertanggung jawabkan, hal tersebut merupakan bentuk transparansi dalam pengelolaan keuangan. Namun demikian prinsip transparansi dan kejujuran dalam pertanggung jawaban tersebut harus tetap dijunjung tinggi. Dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan tersebut, yang perlu diperhatikan oleh bendaharawan menurut Suryana (2008) adalah:

1. Pada setiap akhir tahun anggaran, bendahara harus membuat laporan keuangan kepada komite sekolah untuk dicocokkan dengan RAPBS.
2. Laporan keuangan tersebut harus dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang ada.
3. Kwitansi atau bukti pembelian atau bukti penerimaan dan bukti pengeluaran

lain.

4. Neraca keuangan juga harus ditunjukkan untuk diperiksa oleh tim pertanggungjawaban keuangan dari komite sekolah.

2.2.9 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

2.2.9.1 Pengertian BOS

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang berasal dari realokasi dana subsidi BBM (PKPS-BBM) di bidang pendidikan. Program ini bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain. Dengan BOS diharapkan siswa dapat memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar Sembilan tahun.

“Most HEFCT funding is distributed as block grants to institutions, allocated according to formulae which take account of certain factors within each institution, including the number and type of students, the subjects taught and the amount and quality of research undertaken there”. (HEFCT 2010/24)

Sasaran program BOS adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimaksud dalam PKPS BBM Bidang Pendidikan ini mencakup komponen untuk biaya operasional non personil. Biaya operasional non personil inilah yang diprioritaskan, bukan biaya kesejahteraan guru dan bukan biaya untuk investasi.

1. alokasi anggaran BOS ada di masing-masing sekolah dengan perhitungan :

Jumlah siswa X Dana BOS Siswa per tahun

Misal : Sekolah SD Negeri Girirejo 02 jumlah siswanya 131, maka alokasi dana BOS sebesar : $131 \text{ siswa} \times \text{Rp } 800.000 = \text{Rp } 104.800.000/ \text{ th}$

2. Penggunaan dana BOS harus berpedoman pada panduan pelaksanaan program BOS yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat , yang antara lain mengatur tentang :
 - a. Kriteria kegiatan-kegiatan yang boleh dibiayai BOS
 - b. Kegiatan –kegiatan yang tidak boleh dibiayai BOS

Berdasarkan panduan tersebut Dana BOS boleh digunakan untuk :

1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Siswa Baru : biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut.
2. Pembelian buku teks pelajaran dan buku referensi untuk dikoleksi dipergustakaan.
3. Pembelian bahan-bahan habis dipakai: buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, gula kopi dan teh untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.
4. Pembiayaan kegiatan kesiswaan : program remedial, program pengayaan, olah raga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya.

5. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa.
6. Pengembangan profesi guru: pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS.
7. Pembiayaan perawatan sekolah: pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel dan perawatan lainnya.
8. Pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan disekitar sekolah.
9. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer sekolah. Tambahan insentif untuk kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan sekolah ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah.
10. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah.
11. Khusus untuk pesantren salafiyah dan sekolah keagamaan non Islam, dana BOS dapat digunakan untuk biaya asrama/pondokan dan membeli peralatan ibadah.
12. Pembiayaan pengelolaan BOS : ATK, penggandaan, surat menyurat dan penyusunan laporan.
13. Prioritas pertama penggunaan dana BOS adalah untuk komponen a s/d l, bila seluruh komponen diatas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat

digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan mebeler sekolah.

Panduan pelaksanaan BOS (2012:21) juga menetapkan bahwa Dana BOS tidak boleh digunakan untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
2. Dipinjamkan ke pihak lain.
3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya.
4. Membayar bonus, transportasi, atau pakaian yang tidak berkaitan dengan kepentingan murid.
5. Membangun gedung/ruangan baru.
6. Membeli bahan/ peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
7. Menanamkan saham.

2.2.9.2 Organisasi Pelaksana Tingkat Sekolah

Dalam rangka pelaksanaan program BOS, organisasi pelaksana tingkat sekolah (Depdiknas, 2010:8) meliputi :

- a. Penanggungjawab : Kepala Sekolah (sekaligus sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu/PBPP)
- b. Anggota : Bendahara BOS sekolah dan Satu orang dari unsur orang tua siswa di luar Komite Sekolah.
- c. Tugas dan Tanggung Jawab Sekolah, (Depdiknas, 2010: 8) meliputi:

- 1) Mengisi dan menyerahkan LKIS ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
- 2) Melaporkan perubahan data jumlah siswa setiap triwulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
- 3) Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada
- 4) Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan
- 5) Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS di papan pengumuman sekolah
- 6) Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RAPBS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah
- 7) Membuat laporan triwulanan penggunaan dana BOS dan barang/jasa yang dibeli oleh sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah
- 8) Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah
- 9) Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat
- 10) Menyampaikan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
- 11) Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan

2.2.9.3 Tata Tertib Pengelolaan Dana BOS di Sekolah, (Depdiknas, 2010:8)

meliputi:

- a. Tidak diperkenankan melakukan manipulasi data jumlah siswa;
- b. Mengelola dana BOS secara transparan dan bertanggung jawab;
- c. Mengumumkan hasil pembelian barang dan harga yang dilakukan oleh sekolah di papan pengumuman sekolah yang harus ditandatangani oleh Komite Sekolah;
- d. Menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada orang tua siswa setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua siswa dan sekolah pada saat penerimaan raport;
- e. Bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola oleh sekolah, baik yang berasal dari dana BOS maupun dari sumber lain;
- f. Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada peserta didik di sekolah yang bersangkutan

2.2.9.4 Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah

a. Waktu Penyaluran Dana

Tahun anggaran 2011, dana BOS diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2011, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2010/2011 dan semester 1 tahun pelajaran 2011/2012. Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. (Depdiknas, 2010:3).

b. Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah

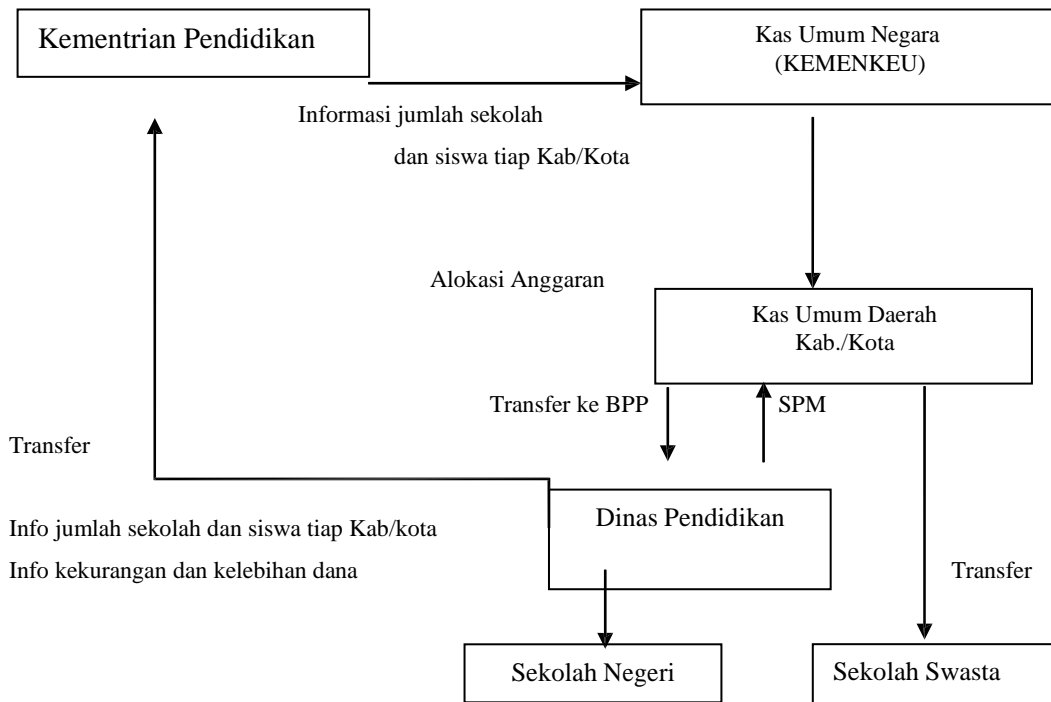
Mekanisme penyaluran Dana BOS untuk Sekolah Negeri, (Depdiknas, 2010) yaitu:

- 1) Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap triwulan sesuai alokasi anggaran per sekolah yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
- 2) KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).
- 3) Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) di Dinas Pendidikan mentransfer Dana BOS yang diterima dari BUD langsung ke Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP) untuk pembayaran kegiatan BOS di masing-masing sekolah.
- 4) PBPP melaporkan realisasi penggunaan dana yang diterimanya per triwulan dengan melampirkan rekap SPJ dan dokumen bukti pertanggungjawaban yang sah kepada BPP di Dinas Pendidikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum berakhirnya setiap triwulan.
- 5) Realisasi penggunaan dana BOS sesuai dengan jumlah dan bukti-bukti yang sah dicatat dalam Buku Kas Umum oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu berikut pengelompokan realisasi anggaran per jenis belanja.
- 6) Pencairan triwulan kedua dan seterusnya diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu sesuai angka 1) sampai dengan angka 4) di atas

dengan memperhatikan perubahan alokasi per sekolah yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional

7) Tim Manajemen BOS Kabupaten melaporkan kekurangan atau kelebihan dana BOS per sekolah berdasarkan jumlah murid di masing-masing sekolah pada angka di atas kepada Kementerian Pendidikan Nasional untuk dilakukan penyesuaian alokasi per sekolah.

Adapun mekanisme penyaluran dana BOS tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Bagan 1.

Mekanisme penyaluran dana BOS tahun 2011

Keterangan :

BPP : Bendahara Pengeluaran Pembantu

SPM : Surat Perintah Membayar

8. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dari seluruh dana BOS yang diterima, sekolah diperbolehkan menggunakandana tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatan berikut ini:

- a. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran
- b. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru
- c. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pementapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, usaha kesehatan sekolah, dan sejenisnya
- d. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah, dan laporan hasil belajar siswa
- e. Pembelian bahan-bahan habis pakai.
- f. Pembiayaan langganan daya dan jasa.
- g. Pembiayaan perawatan sekolah
- h. Pembiayaan honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer
- i. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP, dan KKKS/MKKS
- j. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transportasi ke sekolah
- k. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor, penggandaan, surat menyurat dan lain-lain dalam rangka penyusunan laporan BOS

l. Pembelian komputer dan printer untuk kegiatan belajar siswa masing-masing

1 unit dalam waktu satu tahun anggaran

m. Bila seluruh komponen diatas telah terpenuhi pendanaannya dan dana BOSmasih terdapat sisa maka dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik peralatan UKS dan mebeler sekolah

Dari seluruh komponen yang diperbolehkan menggunakan dana BOS, dana BOS digunakan untuk mendanai biaya operasi sekolah. Namun terdapat beberapakomponen biaya modal dan biaya personalia sekolah yang dapat didanai menggunakan dana BOS. Biaya investasi sekolah yang diperbolehkan menggunakan dana BOS yaitu pembelian komputer beserta printernya, pembiayaan peningkatan profesi guru dan kepala sekolah. Sedangkan biaya modal yang dapat didanai menggunakan dana BOS yaitu pembiayaan honorarium guru dengan batasan penggunaan maksimal 20% dari dana BOS yang diterima. Adapun dalam pengelolaan dana BOS di sekolah, dana BOS tidak diperbolehkan untuk:

- a. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan
- b. Dipinjamkan kepada pihak lain
- c. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya

- d. Membiayai kegiatan/iuran rutin yang di selenggarakan oleh UPTD Kecamatan/ Kabupaten/ Kota/ Provinsi/ Pusat, atau pihak lainnya (KKKS/ MKKS, dll), bilamana pihak sekolah tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut
- e. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
- f. Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah)
- g. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
- h. Membangun gedung/ruangan baru
- i. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
- j. Menanamkan saham
- k. Khusus untuk sekolah yang menerima DAK, dana BOS tidak boleh digunakan untuk membeli buku referensi dan pengayaan untuk dikoleksi di perpustakaan
- l. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar, misalnya guru kontrak/guru bantu
- m. Kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya iuran dalam rangka hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan
- n. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/ sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/ perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas Pendidikan Provinsi/

Kabupaten/ Kota dan Kementerian Pendidikan Nasional. Menurut Buku Panduan BOS 2011, Pembelian barang/jasa dilakukan oleh Tim Sekolah dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Tim Sekolah harus menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan barang/ jasa dan tempat pembeliannya.
- b. Tim harus memperhatikan kualitas barang/jasa, serta ketersediaan, dan kewajaran harga.
- c. Tim Sekolah harus membandingkan harga penawaran dari penyedia barang/jasa dengan harga pasar dan melakukan negosiasi harga kepada penyedia barang/jasa apabila harga penawaran lebih tinggi dari harga pasar.

Terkait dengan biaya untuk perawatan ringan/ pemeliharaan bangunan sekolah, Tim Sekolah harus menerapkan prinsip-prinsip berikut:

- a. Membuat rencana kerja.
- b. Memilih satu atau lebih pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan standar upah yang berlaku di masyarakat.
- c. Membuat laporan penggunaan dana (pembelian barang dan pembayaran upah) untuk kegiatan perawatan ringan/pemeliharaan sekolah.

9. Pengawasan dan Monitoring Dana Bantuan Operasional Sekolah Pengawasan program BOS (Depdiknas, 2010:22), meliputi:

- a. Pengawasan Melekat
- b. Pengawasan Fungsional, dan

c. Pengawasan Masyarakat.

Prioritas utama dalam program BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota kepada sekolah. Pengawasan fungsional internal dilakukan oleh Inspektorat Jendral Depdiknas serta Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Instansi pengawas eksternal yang melakukan pengawasan program BOS adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOS, unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat disekolah juga dapat mengawasi pelaksanaan program BOS namun tidak melakukan audit (Depdiknas, 2010).

Selain kegiatan pengawasan, pengelolaan dana BOS juga dilakukan pemeriksaan dalam bentuk monitoring. Kegiatan monitoring internal dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Tingkat Pusat, tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota. Selain monitoring oleh Tim BOS Kabupaten, monitoring BOS juga dilakukan secara integrasi dengan monitoring sekolah yang dilakukan oleh pengawas sekolah. Sedangkan monitoring eksternal dilakukan oleh Badan penelitian dan pembangunan (Balitbang) dan lembaga independen lain yang kompeten. Adapun komponen utama yang dimonitor, (Depdiknas, 2010:18) adalah:

- a. Alokasi dana sekolah penerima bantuan
- b. Penyaluran dan penggunaan dana
- c. Pelayanan dan penanganan pengaduan

d. Administrasi keuangan

e. Pelaporan

10. Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dalam pertanggungjawaban penggunaan dana BOS, sekolah harus melaporkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, meliputi: laporan realisasi penggunaan dana per sumber dana, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Bank, beserta dokumen pendukung bukti pengeluaran dana BOS (kuitansi/faktur/nota/bon dari vendor/toko/supplier). Sekolah juga harus mengarsipkan sebagai bahan audit. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Tim Manajemen Kabupaten/ Kota setiap triwulan paling lambat 10 hari kerja sebelum berakhirnya triwulan tersebut (Depdiknas, 2010:56). Selain itu, hal-hal yang perlu dilaporkan ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/kota dan didokumentasikan meliputi berkas-berkas, (Depdiknas, 2010:21) sebagai berikut:

- a. Nama-nama siswa miskin yang dibebaskan dari pungutan
- b. Jumlah dana yang dikelola sekolah dan catatan penggunaan dana
- c. Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran
- d. Lembar pencatatan pengaduan

2.2.10 Efektivitas

Efektivitas menurut Kurniawan (2005 :109) adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu

organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketengangan diantara pelaksanaannya. Sedarmayanti (2009 :59) mendefinisikan konsep efektivitas sebagai suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat.

Makmur (2011: 5) mengungkapkan efektivitas berhubungan dengan tingkat kebenaran atau keberhasilan dan kesalahan. Ia berpendapat bahwa untuk menentukan tingkat efektivitas keberhasilan seseorang, kelompok, organisasi bahkan sampai kepada negara kita harus melakukan perbandingan antara kebenaran atau ketepatan dengan kekeliruan atau yang dilakukan. Semakin rendah tingkat kekeliruan atau kesalahan yang terjadi, tentunya akan semakin mendekati ketepatan dalam pelaksanaan setiap aktivitas atau pekerjaan (tugas) yang dibebankan setiap orang.

Handayanigrat dalam skripsi Fajri yang berjudul *Efektivitas kegiatan komisi pemilihan umum kabupaten tanggamus dalam penyelenggaraan pemilihan anggota legislatif pada pemilu 2004* (2006 : 13), mengemukakan definisi dari efektivitas adalah suatu pengukuran untuk menilai pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya berhasil dicapai maka hal itu dikatakan efektif.

Sebaliknya jika tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tidak tercapai atau tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, maka dikatakan tidak efektif.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menilai tingkat efektivitas dapat digunakan perbandingan antara rencana awal dengan hasil kenyataan yang didapat . Semakin efektif jika tingkat kekeliruan atau kesalahan yang terjadi rendah. Begitu pula sebaliknya semakin tinggi tingkat kesalahan daripada rencana yang awal maka semakin tidak efektif. Efektivitas adalah suatu ukuran tentang bagaimana suatu target atau sasaran yang telah ditentukan tercapai yang mengacu pada hasil akhir. Hasil akhir adalah tujuan utama. Semakin mencapai target yang ditentukan maka efektivitasnya semakin baik.

Hal ini sesuai dengan pendapat Mahmudi (2005: 92) yang mendefinisikan efektivitas adalah merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jadi dalam hal ini yang dimaksud dengan *output* disini adalah hasil dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Target sasaran atau tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat yang diharapkan setelah mampu bermandiri akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Dapat dikatakan efektif apabila program ini hasilnya adalah mampu mengurangi jumlah tingkat kemiskinan masyarakat yang ada sehingga sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan.

Tingkat efektivitas dapat dilihat dan dinilai dari hasil yang telah dicapai. apabila output atau hasil yang dicapai sesuai atau mencapai target sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, maka hal itu dapat dikatakan efektif. Namun sebaliknya dapat dikatakan tidak efektif apabila hasil yang didapat tidak sesuai dengan target sasaran yang telah ditentukan. Untuk itu diperlukan suatu indikator atau ukuran untuk melihat tingkat efektivitas. Ukuran efektivitas bermacam-macam, antara lain :

Menurut pendapat David Krech, Richard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey dalam Danim (2012 : 119 – 120) menyebutkan indikator efektivitas sebagai berikut :

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan

Hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*), usaha dengan hasil, persentase pencapaian program kerja dan sebagainya.

2. Tingkat kepuasan yang diperoleh

Ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).

3. Produk kreatif

Penciptaan hubungan kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreatifitas dan kemampuan.

4. Intensitas yang akan dicapai

Memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

Pendapat di atas dijelaskan bahwa ukuran efektivitas harus dilihat dari perbandingan antara masukan dan keluaran, tingkat kepuasan yang diperoleh, Penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta adanya rasa saling memiliki yang tinggi. Rasa memiliki yang tinggi tersebut bukan berarti berlebihan.

Makmur (2011:7-9) mengungkapkan indikator efektivitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas, sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu

Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Ketepatan perhitungan biaya

Berkaitan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, dalam arti tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan – satuan biaya merupakan bagian daripada efektivitas.

3. Ketepatan dalam pengukuran

Dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran daripada efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi.

4. Ketepatan dalam menentukan pilihan.

Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik atau yang terjujur diantara yang jujur atau kedua-duanya yang terbaik dan terjujur diantara yang baik dan jujur.

5. Ketepatan berpikir

Ketepatan berfikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.

6. Ketepatan dalam melakukan perintah.

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan tidak dapat dimengerti dan dipahami maka akan mengalami kegagalan yang akan merugikan organisasi.

7. Ketepatan dalam menentukan tujuan

Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan

yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

8. Ketepatan ketepatan sasaran

Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Berdasarkan uraian indikator efektivitas oleh Makmur di atas intinya dapat dilihat bahwa efektivitas merupakan suatu pengukuran dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan ukuran-ukuran ketepatan efektivitas dimana suatu target atau sasaran dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sedangkan Richard M. Steers dalam Tangkilisan (2005) mengungkapkan ada 3 indikator dalam efektivitas. Ia mengatakan indikator efektivitas sebagai berikut :

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari 2 sub-indikator, yaitu : kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan konsensus. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan di lapangan.

Berdasarkan beberapa indikator efektivitas yang diungkapkan menurut beberapa ahli diatas, bahwa teori yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah indikator efektivitas menurut Richard M. Steers. Alasan peneliti menggunakan teori ini adalah karena keseluruhan indikator efektivitas dalam teori ini sesuai dengan fokus penelitian yang peneliti lakukan yaitu fokus Efektivitas penyaluran dana BOS. Pertama, indikator pencapaian tujuan, Steers mengungkapkan pencapaian tujuan terdiri dari 2 sub-indikator, yaitu kurun waktu dan sasaran. Dalam penelitian ini penyaluran dana bos dilaksanakan setiap triwulan. Rencana awal adalah target awal atau tujuan telah disusun untuk membiayai pendidikan anak. Apabila program tidak berjalan dengan sesuai juknis maka tidak efektif , tapi jika program dilakukan sesuai juknis maka dianggap efisien.

Kemudian yang kedua, indikator Integrasi. Dalam penelitian ini ingin melihat sejauh mana sekolah melakukan penyaluran dana BOS, apakah

penyaluran dana BOS sudah sesuai dengan juknis atau belum yang didalamnya terdapat aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Indikator yang terakhir, yaitu indikator adaptasi. Alasan mengapa digunakan teori ini adalah selain menggunakan indikator pencapaian tujuan dan Integrasi, teori M. Steers juga menggunakan indikator adaptasi yang dapat digunakan untuk melihat kesesuaian antara program organisasi dengan keadaan di lapangan. Organisasi yang dimaksud dalam teori ini adalah SD Negeri Girirejo 02 , yang diharapkan penyaluran dana Bos mengenai penerimaan dan pengeluaran harus sesuai dengan apa yang dilaporkan.

2.3 Kerangka Berfikir

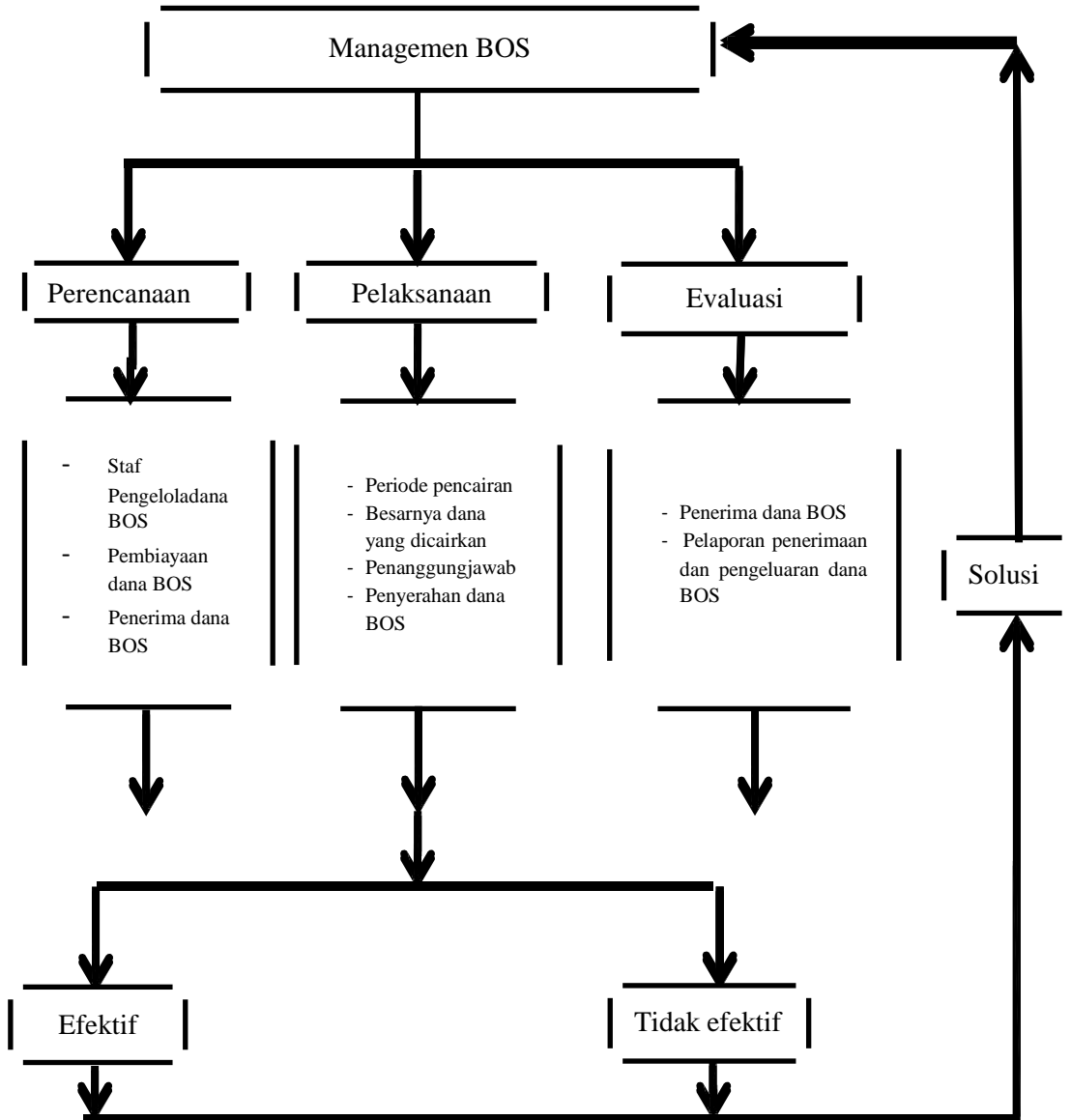
Pengelolaan biaya sangat dibutuhkan dalam menyusun anggaran , terutama dalam masa otonomi daerah sekarang ini. Pengelolaan biaya sangat dibutuhkan dalam menyusun anggaran kinerja seperti yang ada dalam PP No. 105 tahun 2000, sebaiknya pengelolaan biaya dilakukan secara rutin sehingga penyusunan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dapat mengurangi kesalahan pengalokasian anggaran.

Biaya pendidikan merupakan salah satu input kegiatan dan sekaligus sebagai sumber daya yang sangat penting dalam pendidikan. Tanpa didukung dana yang memadai maka akan sulit untuk memperoleh mutu belajar yang baik, mutu belajar yang baik merupakan output dari sebuah proses..Salah satu masalah pokok dalam pembiayaan pendidikan adalah bagaimana mencukupi kebutuhan investasi, operasional dan personal sekolah serta bagaimana

melindungi masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu untuk memperjuangkan haknya mendapatkan pendidikan yang layak baik di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatasi hal tersebut adalah memberikan DanaBantuanOperasional Sekolah (BOS) kepada sekolah-sekolah yang terdaftar. BOS diberikan kepada sekolah tingkat dasar yaitu SD dan SMP guna mencapai pelaksanaan wajib belajar9 tahun. Meskipun program ini telah berjalan dan sukses namun masih banyak siswa lulusan SMP yang putus sekolah dan tidak melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Atas(SMA).

Dalam Managemen bos harus terdapat fungsi-fungsi managemen yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Di SDN Girirejo 02 sudah menerapkan fungsi managemen tersebut untuk penyaluran dana Bantuan operasional sekolah. Untuk memperjelas alur pemikiran, penulis membuat bagan yang menggambarkan isi dari pemikiran diatas, yaitu :

KERANGKA BERPIKIR



Gambar 1. Kerangka Berpikir

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan bahwa Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Girirejo 02, Kec. Ngablak, Kab. Magelang adalah sebagai berikut :

1. Manajemen BOS

Dari hasil penelitian Manajemen BOS, Efektivitas penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah SD Negeri Girireji 02 meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi :

- a. Efektivitas Perencanaan pengelolaan dana BOS pada SD Negeri Girirejo 02 sudah berhasil guna sesuai dengan indikator keberhasilan dalam aspek perencanaan yaitu waktu penyusunan RKAS yang tepat waktu yaitu diawal tahun anggaran, penggunaan skala prioritas kebutuhan sekolah, dan keterlibatan komite sekolah dan guru dalam penyusunan RKAS.
- b. Dari aspek Efektifitas pelaksanaan pengelolaan dana BOS pada SD Negeri Girirejo 02 belum seluruhnya berhasil guna karena dalam mencapai indikator keberhasilan dalam penggunaan dana BOS. Diantaranya yaitu proses penyaluran Dana BOS yang masih terlambat dalam pencairannya. Untuk indikator yang lain seperti penggunaan dana BOS Proses, Pembukuan dan Administrasi sudah sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS Permendiknas No. 48 Tahun 2017

c. Dari aspek Efektivitas evaluasi SD Negeri Girirejo 02 belum berhasil guna karena belum ada pengawasan dari pihak komite sekolah dan dinas terkait mengenai pengelolaan dana BOS. Namun untuk evaluasi, pihak komite sudah melakukannya meskipun belum maksimal .

2. Tingkat Efektivitas

Tingkat efektivitas dari penyaluran dana BOS di SD Negeri Girirejo 02, Kec. Ngablak, Kab. Magelang diukur berdasarkan pembahasan yang diuraikan berdasarkan data. Hal tersebut dapat dilihat dari perolehan masing-masing indikator, yaitu berdasarkan indikator perencanaan dengan kriteria efektif (63%), indikator pelaksanaan dengan kriteria efektif (63%), dan indikator evaluasi dengan kriteria efektif (61%). Maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana BOS SDN Girirejo 02 termasuk dalam kategori efektif dengan presentase 63 %.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka Efektivitas Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Girirejo 02 diajukan saran sebagai berikut:

1. Sekolah bersama komite sekolah mensosialisasikan kepada orang tua bahwa semua siswa menerima BOS.
2. Sekolah diharapkan dapat memberitahu mengenai laporan penggunaan dana BOS untuk apa saja agar orang tua mengetahui bagaimana pengelolaan dana BOS di sekolah.

3. Penelitian selanjutnya dapat menambah responden penelitian yaitu Dinas Pendidikan untuk mengetahui tingkat pertanggungjawaban/akuntabilitas sekolah secara vertikal.
4. Diperlukan suatu pelatihan dalam bentuk bimbingan teknis bagi sumber daya manusia khususnya pengelola BOS agar dapat bekerja secara efektif dan efisien, sehingga mampu melaksanakan tugasnya sesuai Petunjuk Teknis dengan benar. Pengelola dana BOS perlu ditingkatkan melalui pendidikan lanjut agar pengelola dana BOS betul-betul memahami petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang BOS serta mampu memahami uraian tugas pengelola BOS.
5. Pemerintah Pusat (Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah) diharapkan membuat format pelaporan dan administrasi yang lebih sederhana sehingga memudahkan dalam pengelolaan dana BOS.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkafi, Ali Mahrus .(2012) .*Pengaruh SIM Menggunakan Aplikasi Software SDS++ Terhadap Efektifitas Pengelolaan BOS SMP di Kota Magelang*. Semarang. Uness Press
- Anas Sudijono.2011.*Pengantar Evaluasi Pendidikan*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, S., 2008. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*.Jakarta : Bumi Aksara
- 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi 6. Jakarta : Rineka Cipta.
- Arinoto, Taufiq.2014. *Pengaruh Fasilitas Sekolah dan Lingkungan Sekolah terhadap Kepuasan Siswa Melalui Mutu Layanan di SMA Swasta Sekecamatan Pedurungan Kota Semarang*. Uness Press
- Budianas, Nanang. 2013. *Pengertian Kinerja Keuangan*.
<http://nanangbudianas.blogspot.com/2013/02/pengertian-kinerja-keuangan.html>.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Terjemahan Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Depdiknas, Depag. 2010. *Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun*. Jakarta
- Elisah,Milyani L. Prishardoyo, Bambang.(2017). “*Implementasi Kebijakan Pungutan Biaya di SD N 02 Pododadi Kabupaten Pekalongan*” . Semarang .Unnes
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta : Rajawali Pers
- Fakhruddin, 2011. *Pasar Modal di Indonesia*.Edisi 3.Salemba Empat : Jakarta.
- Harsono.2008. *Pembiayaan Pendidikan (Konsep Dasar Mikro, Meso, dan Makro)*.Yogyakarta: Surayajaya Press.
- Hasibuan,Malayu S.P.2009.*Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*.Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hayati, Dwi.2012. “ *Manajemen Pembiayaan Berbasis Sekolah di RSBI SMPN 3 Mranggen Demak*”.Semarang.Unnes Press

Iqba, Hasan.2006.*Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta : Bumi Askara.

<http://bos.kemdikbud.go.id/home/about>

Javed Hussain, Harry Matlay, dan Jonathan M. Scott. 2008." *Financial education in small ethnic minority businesses in the UK*", Education + Training, Vol. 50 Issue: 8/9, pp.737-747,

<https://doi.org/10.1108/00400910810917109>

John,Creedy dan Norman,Gemmell. 2005. " *Publicly financed education in an endogenous growth model*". Journal of Economic Studies, Vol. 32 Issue: 2, pp.114-131.

<https://doi.org/10.1108/01443580510600904>

Karomah, Panuntun Nur.(2017)."*Implementasi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Pada Era Otonomi Daerah*".Semarang.Unnes Press

Kemendiknas .2011.*Kebijakan Program Bantuan Operasional sekolah (BOS) Tahun 2011*. <http://Google.com>, Diakses tanggal 14 Oktober 2017.

Latifah, Rosidah Nurul .(2017)."*Manajemen Kegiatan Ekstrakurikuler Bahasa Inggris di SMK Negeri 7 Semarang*".Semarang.Unnes Press

Lewis, G. Liu dan Richard, Holowczak,(2000). " *Using Reuters 3000 Xtra system for financial information education*".Online Information Review, Vol. 24 Issue: 5, pp.371-381.

<https://doi.org/10.1108/14684520010357310>

Lindorff, M. Dan Prior Jonson, E. W.2013."*CEO business education and firm financial performance: a case for humility rather than hubri*".In :*Education and Training*,55, 4/5, p. 461 - 47717 p.

Lindsey, Appleyard dan Karen, Rowlingson.2013.*Children and Financial Education: Challenges for Developing Financial Capability in the Classroom*.Volume 12, Issue 4, pp. 507-520.

<https://doi.org/10.1017/S1474746412000644>

M. Athar Murtuza, William Brunsen, (1988) "Education of the Financial Planner", American Journal of Business, Vol. 3 Issue: 2,pp.54-58,

<https://doi.org/10.1108/19355181198800017>.

Miles, Mattew B dan Amichael Huberman.2009. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta : Universitas Indonesia.


- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mugiri, Lestari, Wahyu .(2013). "*Instrumen Evaluasi Program dana BOS Model CIPP*". Semarang. Unnes
- Mulasari, Frestiana Dyah .(2015). "*Peran Gender Perempuan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2012*". Semarang. Unnes Press
- Mulyasa E., 2006. *Menjadi Kepala Sekolah profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyono. 2008. *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nafisah, Durotun dkk .(2017). "*Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Aliyah*". Semarang. Unnes Press
- Nana, Syaodih Sukmadinata. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nishimura, Mikiko. 2006. "*Considering Equity in Basic Education Reform in Japan From the Perspective of Private Costs of Education*". Japan. Kobe University.
- Nurmaunel, Pratiwi Chrisnanda.(2013). "*Penggunaan Buku Sekolah Elektronik (BSE) sebagai Sumber Belajar dalam Proses Pembelajaran IPS Sejarah di SMP Negeri 1 Batang*". Semarang. Unnes
- Oluyele, Akinkugbe. 2000. "*Higher education financing and equality of educational opportunities in Swaziland*". International Journal of Social Economics, Vol. 27 Issue: 11, pp.1074-1097, <https://doi.org/10.1108/03068290010352461>
- Prastyo, Hendy. 2014. *Survei Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Olahraga pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2013*. Semarang. Unnes Press
- Prastyo, Kuncoro Bayu dkk. 2008. "*EFEKTIVITAS DANA SUBSIDI LANGSUNG TUNAI (SLT) DALAM MENGATASI DAMPAK KENAIKAN HARGA BBM BAGI MASYARAKAT MISKIN*". Unnes Press
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Keempat). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Ratnaningtyas, Setiyani, Rediana .(2017).*Efektivitas Komite Sekolah sebagai Badan Pengawas Manajemen Keuangan Sekolah pada SMA Negeri Se-Kota Semarang*. Semarang.Unnes Press
- R.Terry, George dan Leslie W.Rue.2010.*Dasar-Dasar Manajemen*.Jakarta: Bumi Aksara.
- Ridwan.2004.*Metode Penelitian Survei*. Jakarta : Rajawali.
- Robbins, Stephen P. 2001. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi,Jilid 1, Edisi 8*.Jakarta: Prenhallindo..
- Sagala, Syaiful. (2011). *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung : Alfabeta.
- Sangaji, Etta Mamang dan Sopiah.2010.*Metodologi Penelitian*.ANDI.Yogyakarta.
- Steve, Dyer. (1994). "*Kirkpatrick's Mirror*", Journal of European Industrial Training, Vol. 18 Issue: 5, pp.31-32.
Tersedia : <https://doi.org/10.1108/03090599410058980>
[diakses tanggal 10 Desember 2018]
- Sudjana, Nana. 2004. *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensido Offset.
- Sugiono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi. 2008. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Supriadi, D. 2010. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah*.1999. Jakarta: Sekretaris Negara.
- Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, selain DAU, dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah adalah dana bagi hasil dan Dana Alokasi Khusus (DAK)*.1999.Jakarta: Sekretaris Negara.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* . 2003. Jakarta: Sekretaris Negara.

- Wang, Wen dkk.2011. "*Fiscal effects of local option sales taxes on school facilities funding: The case of North Carolina. Volume 12, Issue 4* ", pp. 507-520.
- Winarno,Udin dkk.(2016). *Analisis Media yang Digunakan Guru Sejarah dalam Pembelajaran Sejarah pada Dua Sekolah Menengah Atas di Kota Semarang Tahun Pelajaran 2015/2016 (Studi Kasus pada SMA Kolose Loyola Semarang dan SMA Negeri 5 Semarang)*.Semarang.Unnes Press
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. 2004. Jakarta: Sekretaris Negara.
- Usman. (2009). *Metode Penelitian Sosial*.Jakarta: Bumi Aksara.
- Veithzal Rivai. (2007). *Bank and Financial Institute Management*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PASCASARJANA
Gedung A, Kampus Pascasarjana, Jl. Kelud Utara III, Semarang 50237
Telepon +6224-8440516, 8449017, Faksimile +6224-8449969
Laman: <http://pps.unnes.ac.id>, surel: pps@mail.unnes.ac.id

Nomor : 1266/UN37.2/LT/2019 31 Januari 2019
Hal : Izin Penelitian

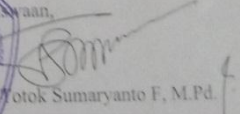
Yth. Kepala SD Negeri Girirejo 02
Srigading, Girirejo, Ngablak, Magelang, Jawa Tengah

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

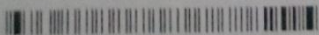
Nama	: Rinda Herdiyani
NIM	: 0102515030
Program Studi	: Manajemen Pendidikan, S2
Semester	: Genap
Tahun akademik	: 2018/2019
Judul	: EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) di SD NEGERI GIRIREJO 02

Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian tesis di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 1 Februari - 1 April 2019.


Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Pascasarjana
Direktur Bid. Akademik dan
Kamipasiswaan,

UNNES Dr. Totok Sumaryanto F, M.Pd.
196410271991021001

Tembusan:
Direktur Pascasarjana;
Universitas Negeri Semarang

 2019.09.23 22:13

Lampiran 2



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
UPT DISDIKBUD KECAMATAN NGABLAK
SD NEGERI GIRIREJO 2
TERAKREDITASI A
Alamat : Jl Ngablak-Grabag Km.2 Girirejo Ngablak Magelang KP 56194
NSS : 101030817025, NPSN : 20307833, NIS : 100170
E-mail :

SURAT KETERANGAN
Nomor : 421.2/35a/04.17.25/SDN/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah SD Negeri Girirejo 2 :


Nama : Drs. Kun
NIP : 196110101982041001
Jabatan : Kepala Sekolah


Menerangkan bahwa :

Nama : Rinda Herdiyani
NIP : 0102515030

Mahasiswa program studi Manajemen Pendidikan PASCASARJANA Universitas Negeri Semarang, telah melakukan penelitian di Sekolah Dasar Negeri Girirejo 2, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang pada tanggal 1 Februari – 1 April 2019 dengan baik.

Demikian surat keterangan ini, kami buat dengan sesungguhnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Girirejo, 10 April 2019
Kepala Sekolah

Drs. Kun
NIP.196110101982041001



2019.09.23 22:14

Lampiran 3

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Kepala Sekolah

Identitas Kepala Sekolah

Nama : Drs.Kun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Latar belakang pendidikan : S1
Unit Kerja : SD Negeri Girirejo 02

1. Apakah sekolah mempunyai visi dan misi ?
2. Bagaimana struktur tim manajemen BOS di Sekolah Dasar Negeri Girirejo 02?
3. Bagaimana gambaran dana BOS di Sekolah Dasar Negeri Girirejo 02?
4. Bagaimana perencanaan penggunaan dana BOS ?
5. Bagaimana proses penyusunan RAPBS ?
6. Sumber dana RAPBS dari mana saja ?
7. Apakah ada perubahan RAPBS ?
8. Bagaimana perencanaan SDM pengelola BOS ?
9. Bagaimana pelaksanaan penggunaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri Girirejo 02 ?
10. Bagaimana evaluasi penggunaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri Girirejo 02?
11. Bagaimana mekanisme pembelian barang / jasa di Sekolah Dasar Negeri Girirejo 02 ?
12. Bagaimana kinerja bendahara dalam mengelola keuangan ?
13. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah ?
14. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah dan komite ?
15. Bagaimanakah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program BOS di Sekolah Dasar Negeri Girirejo 02?
16. Bagaimanakah solusi dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program BOS di Sekolah Dasar Negeri Girirejo 02?

Lampiran 4

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Bendahara BOS

1. Bendahara BOS

Nama	: Ristiyaningsih, S.Pd
Jenis Kelamin	: Perempuan
Latar belakang pendidikan	: S1
Unit Kerja	: SD Negeri Girirejo 02
2. Bagaimanakah perencanaan penggunaan dana BOS ?
3. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan RAPBS ?
4. Kapan waktu penyusunan RAPBS ?
5. Bagaimana proses penyusunan RAPBS ?
6. Apakah ada perubahan RAPBS ?
7. Bagaimana pelaksanaan penggunaan dana BOS di SD Negeri Girirejo 02 ?
8. Kapan waktu penyaluran dana BOS ?
9. Penyaluran dana BOS melalui apa ?
10. Berapa besarnya dana BOS yang diterima ?
11. Bagaimana mekanisme penyaluran dana BOS ?
12. Apakah pemanfaatan penggunaan dana BOS sudah sesuai dengan RAPBS?
13. Bagaimanakah evaluasi penggunaan dana BOS ?
14. Bagaimana bentuk laporan dana BOS ?
15. Bagaimanakah rutinitas pembuatan laporan ?
16. Siapa yang membuat laporan ? ditujukan kepada siapa laporan tersebut ?
17. Bagaimanakah kualitas laporan ?
18. Siapa saja yang melakukan pengawasan dan monitoring ?
19. Kapan waktu pengawasan dan monitoring ?
20. Dalam bentuk apa pengawasan dan monitoring ?

Lampiran 5

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Ketua Komite

1. Identitas Komite Sekolah

Nama : Juwarno
Jenis Kelamin : Laki-laki

2. Adakah RAPBS di SD Negeri Girirejo 02 ?
3. Apakah Komite menghadiri penyusunan RAPBS di SD Negeri Girirejo 02?
4. Sumber dana RAPBS dari mana saja ?
5. Bagaimana keterlibatan Komite dalam penyusunan RAPBS SD Negeri Girirejo 02?
6. Apakah terdapat sosialisasi terkait dana BOS ?
7. Dalam setiap periodenya kapan sekolah menerima dana BOS ?
8. Apakah Komite sekolah mengetahui pemanfaatan dana BOS yang dilakukan di SD Negeri Girirejo 02?
9. Apakah Komite selalu mengetahui setiap pengeluaran dalam pelaksanaan dana BOS di SD Negeri Girirejo 02 ?
10. Apakah Komite juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dana BOS pada SD Negeri Girirejo 02 ?
11. Apakah sekolah pernah menerima pengaduan masyarakat terkait pengelolaan dana BOS ?
12. Apakah sekolah melaporkan pengelolaan dana BOS kepada Komite Sekolah ?
13. Bagaimanakah publikasi mengenai penggunaan dana BOS di SD Negeri Girirejo 02?

Lampiran 6

Hasil wawancara terhadap kepala sekolah SD Negeri Girirejo 02

Lokasi : Ruang Guru SD Negeri Girirejo 02
Hari : Senin dan Selasa 11-12 Febuari 2019
Waktu : 09.00 selesai

1. Apakah sekolah mempunyai visi dan misi ?

Jawab : Visi dari SD Negeri GIRIREJO 2 adalah :

“Menjadi Sekolah yang Agamis, Berprestasi, Berkarakter dan Berbudaya ”

Indikator visi :

- 1 Agamis : Beriman dan Taqwa kepada Tuhan YME
Menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya
- 2 Berprestasi : Berprestasi dalam pencapaian hasil UN dengan rata-rata 75
Berprestasi dalam lomba akademik LCC, OSN, Lomba Mata Pelajaran minimal di tingkat kabupaten
Berprestasi dalam lomba nonakademik (Volli) minimal di tingkat Kabupaten.
- 3 Berkarakter : Memiliki sikap jujur, santun, percaya diri, peduli, dan tanggung jawab
- 4 Berbudaya : Menjaga dan melestarikan budaya daerah sekitar

B. Misi Sekolah

1. Melaksanakan sholat lima waktu secara rutin.
2. Melaksanakan ibadah sholat dzuhur berjamaah di sekolah.

3. Membiasakan budaya peduli dan gemar beribadah dengan jumat amal
4. Membiasakan tadarus, membaca asmaul khusna dan doa doa sehari hari
5. Melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi laranganNya dalam kehidupan sehari-hari.
6. Melaksanakan hidup rukun dengan semua umat beragama.
7. Melaksanakan program belajar tambahan bagi kelas VI.
8. Melaksanakan bimbingan dan latihan lomba akademik (LCC, OSN, lomba mata pelajaran).
9. Melaksanakan latihan dan mengikuti lomba nonakademik melalui program ekstrakurikuler khusus bola voli.
10. Membudayakan 3S (Senyum, Salam, Sapa) di sekolah.
11. Membudayakan sikap jujur, santun, percaya diri, dan tanggung jawab melalui pembiasaan dan latihan *lifeskill*.
12. Mengembangkan jiwa seni, budaya dan olahraga.

C. Tujuan Satuan Pendidikan

1. Terwujudnya pribadi yang bertaqwa kepada Tuhan YME dan menghargai perbedaan agama.
 2. Tercapainya nilai UN rata-rata 75 sampai 4 tahun mendatang.
 3. Tercapainya prestasi akademik (LCC, OSN, dan lomba mata pelajaran) minimal tingkat kabupaten selama 4 tahun mendatang.
 4. Tercapainya prestasi di bidang Voli minimal di tingkat kabupaten selama 4 tahun mendatang.
 5. Terwujudnya karakter yang jujur, santun, percaya diri, peduli, dan tanggung jawab.
 6. Melestarikan budaya lokal sebagai budaya yang disegani oleh daerah lain.
 7. Mengenal dan mencintai bangsa, masyarakat, dan kebudayaannya.
2. Bagaimana struktur tim manajemen BOS di SD Negeri Girirejo 02 ?

Jawaban : struktur Tim manajemen BOS di SD Negeri Girirejo 02 terdiri dari Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab dan Bendahara sebagai anggota. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya SK penunjukkan Bendahara BOS.

3. Bagaimana gambaran dana BOS di Sekolah Dasar Negeri Bulurejo ?

Jawaban : Dana BOS digunakan untuk membantu meringankan beban siswa. Semua siswa mendapatkan dana BOS. Pada tahun ajaran 2015 / 2016 jumlah siswa SD Negeri Girirejo 02 yaitu 125 siswa, tahun ajaran 2016 / 2017 jumlah siswa SD Negeri Girirejo 02 yaitu 129 siswa dan tahun ajaran 2017 / 2018 jumlah siswa SD Negeri Girirejo 02 yaitu 131 siswa. Semuanya mendapatkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) baik siswa mampu maupun yang tidak mampu. Besarnya dana bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar Rp 800.000 tiap siswa per tahun.

4. Bagaimana perencanaan penggunaan dana BOS ?

Jawaban : perencanaan penggunaan dana BOS dimulai dari penyusunan RAPBS, kemudian perencanaan SDM tim manajemen pengelola dana BOS.

a. Bagaimana proses penyusunan RAPBS ?

Penyusunan RAPBS dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan sekolah yang akan didanai dengan dana BOS. Identifikasi kebutuhan sekolah ini berpedoman pada buku pedoman dana BOS.

b. Siapa saja yang terlibat penyusunan RAPBS?

Penyusunan RAPBS melibatkan kepala sekolah, dewan guru dan komite sekolah.

c. Kapan penyusunan RAPBS ?

Penyusunan RAPBS dilakukan pada awal tahun pelajaran.

d. Sumber dana RAPBS dari mana saja ?

Sumber dana RAPBS di SD Negeri Girirejo 02 berasal dari pemerintah yang digunakan untuk belanja rutin pegawai, BOS, APBD dan sumbangan sukarela dari orangtua.

e. Apakah ada perubahan RAPBS?

Perubahan RAPBS terjadi apabila terdapat siswa baru atau mutasi siswa. Apabila terjadi hal tersebut, maka sekolah wajib membuat laporan kepada tim Manajemen Kota/ Kabupaten dan diadakan perubahan RAPBS karena besarnya dana BOS sesuai dengan jumlah siswa yang ada.

f. Bagaimana perencanaan SDM pengelola BOS ?

SDM pengelola BOS terdiri dari bendahara BOS dan tim belanja barang. Bendahara BOS ditunjuk dengan pertimbangan bahwa guru tersebut belum memegang keuangan sekolah yang lain. Tim belanja barang merupakan siapa saja yang mau membantu tugas bendahara.

5. Bagaimana pelaksanaan penggunaan dana BOS di SD Negeri Girirejo 02 ?

Jawaban : pelaksanaan penggunaan dana BOS di SD Negeri Girirejo 02 sesuai dengan petunjuk teknis yang ada.

o Bagaimana mekanisme penyaluran dana BOS ?

Dana BOS diberikan melalui rekening sekolah pada awal tahun anggaran. Dana BOS turun setiap triwulan.

6. Bagaimana evaluasi penggunaan dana BOS di SD Negeri Girirejo 02?

Jawaban : evaluasi penggunaan dana BOS dibuat dalam bentuk laporan penggunaan dana BOS yang dibuat oleh bendahara. Laporan ini dibuat setiap triwulan, yang nantinya akan diserahkan kepada tim manajemen BOS Dinas Pendidikan Kecamatan yang akan diserahkan kepada tim manajemen BOS Kota/Kabupaten.

7. Bagaimana mekanisme pembelian barang / jasa di SD Negeri Girirejo 02?

Jawaban : dalam pembelian barang / jasa, kepala sekolah bersama dewan guru selalu melakukan diskusi terlebih dahulu. Untuk rehabilitas bangunan sekolah selalu membuat rencana kerja.

8. Bagaimana kinerja bendahara dalam mengelola keuangan ?

Jawaban : selama ini berjalan cukup baik, hanya saja sering mengalami keterlambatan dalam pembuatan laporan. Bendahara juga sering mengalami kesulitan dalam pembuatan karena banyaknya laporan yang harus dibuat dan

laporan terlalu rumit sedangkan waktu pembuatan laporan sedikit karena harus membagi waktu dengan mengajar.

9. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah ?

Jawaban : pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan dana BOS dilakukan setiap hari terhadap semua kegiatan disekolah. Pengawasan juga dilakukan dengan memeriksa laporan penggunaan keuangan dana BOS setiap bulan atau setiap triwulan. Setiap pembelanjaan yang menggunakan dana BOS juga diperiksa dengan melihat tanda bukti atau kuitansi.

10. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah dan komite ?

Jawaban : pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh kepala sekolah dilakukan setiap saat pada setiap kegiatan sekolah. Sedangkan monitoring dan pengawasan dalam bentuk pengecekan laporan penggunaan dana BOS dilakukan oleh kepala sekolah setiap triwulan. Pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah tidak dilakukan secara detail. Komite hanya memeriksa apakah penggunaan dana BOS sudah sesuai dengan RAPBS atau belum. Pengawasan ini hanya dilakukan dalam rapat dengan melihat laporan penggunaan dana BOS.

11. Bagaimanakah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program BOS di SD Negeri Girirejo 02?

Jawaban : hambatan dalam pelaksanaan dana BOS yaitu kurangnya dana BOS sehingga tidak semua kebutuhan sekolah terpenuhi, terjadi keterlambatan dan kesulitan dalam pembuatan laporan, sering terjadi keterlambatan dalam pencairan dana BOS.

12. Bagaimanakah solusi dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program BOS di SD Negeri Girirejo 02?

Jawaban : sekolah menarik sumbangan sukarela dari orang tua siswa yang sifatnya tidak wajib. Apabila dana yang ada masih belum mencukupi maka kebutuhan sekolah disesuaikan dengan dana yang ada. Dalam mengatasi kesulitan dalam pembuatan laporan penggunaan dana BOS, bendahara dibantu oleh guru dan karyawan lain serta kepala sekolah dalam pembuatan laporan. Kepala sekolah memberikan pengarahan kepada bendahara tentang pengelolaan

keuangan penggunaan dana BOS. Selain itu, kepala sekolah juga mengikutsertakan bendahara BOS dalam pelatihan yang diadakan oleh tim manajemen BOS Kota/Kabupaten di Dinas Pendidikan. Untuk mengatasi keterlambatan pencairan dana, sekolah memakai uang kas sekolah atau menunda pembelanjaan kebutuhan sekolah. Apabila ada kebutuhan sekolah yang sifatnya harus segera dibayar, maka sekolah menggunakan dana iuran sukarela dari orang tua siswa.

Lampiran 7

Hasil wawancara terhadap Bendahara BOS SD Negeri Girirejo 02

Lokasi : Ruang Guru SD Negeri Girirejo 02
Hari : Senin dan Selasa 18 dan 19 Febuari 2019
Waktu : 09.00 – selesai

1. Bagaimanakah perencanaan penggunaan dana BOS ?

Jawaban : perencanaan penggunaan dana BOS dimulai dari penyusunan RAPBS dan perencanaan SDM pengelola RAPBS.

a. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan RAPBS ?

Yang terlibat dalam penyusunan RAPBS yaitu kepala sekolah, dewan guru dan komite sekolah.

b. Kapan waktu penyusunan RAPBS ?

RAPBS dibuat pada awal tahun pelajaran, akan tetapi dana BOS turun pada awal tahun anggaran, jadi kemungkinan adanya perubahan RAPBS.

c. Bagaimana proses penyusunan RAPBS ?

RAPBS disusun dengan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang akan di danai dengan dana BOS. Identifikasi kebutuhan berpedoman pada buku petunjuk teknis penggunaan dana BOS.

d. Apakah ada perubahan RAPBS ?

Perubahan RAPBS sering terjadi, yaitu apabila terdapat siswa baru. Apabila terjadi hal tersebut maka sekolah wajib membuat laporan kepada tim manajemen Kota/Kabupaten dan diadakan perubahan RAPBS karena besarnya dana BOS sesuai dengan jumlah siswa yang ada pada sekolah tersebut.

2. Bagaimana pelaksanaan penggunaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri Bulurejo ?

a. Kapan waktu penyaluran dana BOS ?

Dana BOS disalurkan setiap tiga bulan sekali pada awal bulan pertama. Dana BOS disalurkan lewat rekening yang dibuat oleh sekolah.

c. Berapa besarnya dana BOS yang diterima ?

Besarnya dana BOS yang diterima sesuai dengan jumlah siswa yang ada. Pada tahun 2015, jumlah siswa 125 dana yang diterima sebesar Rp 100.000, pada tahun 2016 jumlah siswa 129 dana yang diterima sebesar Rp 103.200.000, pada tahun 2017 jumlah siswa 131 jumlah dana yang diterima Rp 104.800.000.

d. Bagaimana mekanisme penyaluran dana BOS ?

Dana BOS dikirim melalui rekening sekolah setiap triwulan, kemudian pengambilan dana BOS dilakukan oleh bendahara atau kepala sekolah. Bos dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan sekolah yang sudah ada di RAPBS. Pembelian ini dilakukan oleh bendahara dan tim belanja barang. Setiap pembelian disertakan nota atau kuitansi. Apabila ada penambahan atau pengurangan jumlah siswa, maka harus dibuat laporan kepada tim manajemen BOS Kota/Kabupaten.

e. Apakah pemanfaatan penggunaan dana BOS sudah sesuai dengan RAPBS ?

Pemanfaatan penggunaan dana BOS sudah sesuai dengan apa yang direncanakan dalam RAPBS

3. Bagaimanakah evaluasi pelaksanaan dana BOS ?

Jawaban : evaluasi pelaksanaan dana BOS yaitu dalam bentuk laporan, pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh kepala sekolah dan tim manajemen BOS Kota/Kabupaten

a. Bagaimana bentuk laporan dana BOS ?

Laporan penggunaan dibuat dalam bentuk laporan penggunaan dana BOS yang didalamnya berisi laporan keuangan. Laporan ini terdiri dari RAPBS, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak.

- b. Bagaimanakah rutinitas pembuatan laporan ?
Laporan dibuat setiap triwulan
- c. Siapa yang membuat laporan ? dan ditujukan kepada siapa laporan tersebut ?
Laporan dibuat oleh Bendahara BOS dan apabila mengalami kesulitan, kepala sekolah ikut membantu dalam pembuatan laporan. Laporan penggunaan dana BOS diberikan kepada tim manajemen BOS Kota/Kabupaten dalam bentuk pembukuan dan disampaikan secara lisan oleh kepala sekolah kepada komite sekolah dan orang tua siswa dalam rapat akhir tahun.
- d. Bagaimanakah kualitas laporan ?
Laporan dibuat rapi dalam bentuk pembukuan yang dilampiri semua nota/kuitansi setiap pembelanjaan yang menggunakan dana BOS. Setiap kuitansi dibubuhi tanda tangan kepala sekolah dan bendahara BOS.
- e. Siapa saja yang melakukan pengawasan dan monitoring ?
Pengawasan dan monitoring dilakukan oleh kepala sekolah dan tim manajemen BOS Kota/Kabupaten.
- f. Kapan waktu pengawasan dan monitoring ? dalam bentuk apa?
Pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh kepala sekolah dilakukan setiap saat pada setiap kegiatan sekolah. Sedangkan monitoring dan pengawasan dalam bentuk pengecekan laporan penggunaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri Bulurejo dilakukan oleh kepala sekolah setiap triwulan. Monitoring yang dilakukan oleh tim manajemen BOS Kota/Kabupaten biasanya dilakukan setiap triwulan dalam bentuk pengecekan laporan penggunaan dana BOS.

Lampiran 8

Hasil wawancara terhadap Ketua Komite SD Negeri Girirejo 02

Lokasi : Rumah Ketua Komite SD Negeri Girirejo 02

Waktu : tanggal 15 Maret 2019

1. Adakah RAPBS di SD Negeri Girirejo 02?

Jawaban : Ada, setiap tahun SD Negeri Girirejo 02 selalu membuat RAPBS

2. Apakah Komite menghadiri penyusunan RAPBS di SD Negeri Girirejo 02?

Jawaban : iya, bersama Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Dewan guru menyusun RAPBS

3. Bagaimana keterlibatan Komite dalam penyusunan RAPBS SD Negeri Girirejo 02?

Jawaban : Komite sekolah selalu dilibatkan dalam penyusunan RAPBS, dengan dimintai saran-saran terhadap perencanaan yang telah dibuat oleh guru-guru di SD Negeri Girirejo 02.

4. Sumber dana RAPBS dari mana saja ?

Jawaban : Sumber dana RAPBS di SD Negeri Girirejo 02 berasal dari pemerintah yang digunakan untuk belanja rutin pegawai, BOS, APBD dan sumbangan sukarela dari orangtua.

5. Apakah terdapat sosialisasi terkait dana BOS ?

Jawaban : ada, setiap tahun selalu ada sosialisasi terkait dana BOS yang dihadiri Kepala Sekolah, Bendahara BOS dan Komite Sekolah.

6. Dalam setiap periodenya kapan sekolah menerima dana BOS ?

Jawaban : setiap 3 bulan sekali, dalam 1 tahun ada 4kali.

7. Apakah Komite sekolah mengetahui pemanfaatan dana BOS yang dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Bulurejo ?

Jawaban : pemanfaatan dana BOS yang dilakukan di SD Negeri Girirejo 02 berdasarkan RAPBS.

8. Apakah Komite selalu mengetahui setiap pengeluaran dalam pelaksanaan dana BOS di SD Negeri Girirejo 02?

Jawaban : dalam pelaksanaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri Bulurejo Komite Sekolah tidak selalu ikut serta. Tetapi dalam bantuan lainnya seperti DAK dan dana sukarela dari walimurid, Komite berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaannya.

9. Apakah Komite juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dana BOS pada SD Negeri Girirejo 02 ?

Jawaban : iya, tapi tidak mendetail. Hanya memeriksa apakah penggunaan dana BOS pada SD Negeri Girirejo 02 sudah sesuai dengan RAPBS.

10. Apakah sekolah pernah menerima pengaduan masyarakat terkait pengelolaan dana BOS ?

Jawaban : belum, karena masyarakat selalu menanggapi dengan positif

11. Apakah sekolah melaporkan pengelolaan dana BOS kepada Komite Sekolah ?

Jawaban : iya dilaporkan, karena dalam rapat wali murid juga disampaikan.

12. Bagaimanakah publikasi mengenai penggunaan dana BOS di SD Negeri Girirejo 02?

Jawaban : SD Negeri Girirejo 02 menyampaikan pelaporan penggunaan dana BOS secara lisan oleh kepala sekolah kepada komite sekolah dan orangtua siswa dalam rapat akhir tahun.

KUESIONER PENELITIAN

Identitas Responden

Nama :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
Perencanaan Dana BOS :			
1.	Apakah RAPBS dibuat oleh tim manajemen BOS ?		
2.	Apakah pelaporan dibuat oleh bendahara BOS ?		
3.	Apakah terdapat tenaga pendukung yang membantu bendahara BOS dalam mengelolan dana BOS?		
4.	Apakah sarana untuk mengelola keuangan sekolah sudah memadai?		
5.	Adakah sarana pengelolaan keuangan sekolah yang perlu dibenahi atau ditambah?		
6.	Apakah semua kebutuhan operasional sekolah sudah terpenuhi?		
Pelaksanaan Dana BOS			
1.	Apakah penyaluran dana BOS tepat waktu dan sesuai ketentuan?		
2.	Apakah Kepala sekolah dan Bendahara bertugas mengambil dana BOS di Bank?		
3.	Apakah setiap tahun ada siswa yang mutasi atau keluar dari sekolah ini?		
4.	Apakah Kepala Sekolah bertanggung jawab secara formal atas penerimaan dana BOS ?		
5.	Apakah pengeluaran uang sekolah sesuai dengan RAPBS?		
6.	Apakah sekolah masih bisa menggali dana dari orang tua/sumber lain selain dari dana BOS?		
Evaluasi Dana BOS			
1.	Apakah kepala sekolah bisa mengawasi setiap pengeluaran yang dilakukan bendahara BOS?		
2.	Apakah komite sekolah melakukan pengawasan?		
3.	Apakah evaluasi dilakukan tepat waktu?		
4.	Apakah bendahara menyusun laporan sesuai ketentuan?		
5.	Apakah bendahara selalu menyampaikan pertanggungjawaban dengan baik dan jujur?		
6.	Apakah sekolah spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan gratis?		

Lampiran 10

TABULASI DATA

NO	Hasil Validasi Variabel Perencanaan						Total
	1	2	3	4	5	6	
1	1	1	1	1	1	1	6
2	0	1	1	1	1	1	5
3	1	1	1	1	0	1	5
4	0	1	0	1	1	1	4
5	0	1	1	0	0	1	3
6	1	1	1	1	1	1	6
7	0	1	0	0	0	0	1
8	1	1	1	1	1	1	6
9	0	0	0	0	0	0	0
10	1	1	1	1	1	1	6
	5	9	7	7	6	8	42
Rxy	0,766261	0,670478	0,794256	0,898764	0,76251	0,885989	42
	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	
r tabel	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	

NO	Hasil Validasi Variabel Pelaksanaan						Total
	1	2	3	4	5	6	
1	1	1	1	1	1	1	6
2	1	1	1	1	1	1	6
3	0	1	1	1	0	1	4
4	0	1	0	1	1	1	4
5	1	1	1	0	0	1	4
6	1	1	1	1	1	1	6
7	0	1	0	0	0	0	1
8	1	1	0	1	1	1	5
9	0	0	0	0	0	0	0
10	1	1	1	1	1	1	6
	6	9	6	7	6	8	42
rxxy	0,780625	0,686406	0,680545	0,813125	0,780625	0,907037	
	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	
r tabel	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	

NO	Hasil Validasi Variabel Evaluasi						Total
	1	2	3	4	5	6	
1	1	1	1	1	1	1	6
2	1	1	0	1	1	1	5
3	0	1	1	1	0	1	4
4	1	1	0	1	1	1	5
5	1	0	1	0	0	1	3
6	1	1	1	1	1	1	6
7	0	0	0	0	0	0	0
8	1	1	1	1	1	1	6
9	0	0	0	0	0	0	0
10	1	1	1	1	1	1	6
	7	7	6	7	6	8	41
r _{xy}	0,802804	0,899527	0,579049	0,899527	0,850479	0,908647	
	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	
r tabel	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	